



PETA PROSES BISNIS

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**TAHUN
2018-2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023. Peta proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 17 NOVEMBER 2022

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur, *L*



DINAS
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DR. Drs. Zet Libing, M.Si
Pejabat Utama Muda
NIP196807131989031009

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	vi
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
III. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	3
IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
V. Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	6
A. Peta Proses	6
B. Peta Sub Proses	9
DPE-01. Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan	9
DPE-02. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	10
DPE-03. Peningkatan Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	10
DPE-06. Peningkatan Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata.....	11
C. Peta Relasi	12
D. Peta Lintas Fungsi.....	17
DPE-01.01.01.01.01. Penetapan Regulasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	17
DPE-01.01.01.01.02. Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	17
DPE-01.01.01.01.03. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	18
DPE-01.01.01.01.04. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	18
DPE-01.01.01.02.01. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	18
DPE-01.01.01.02.02. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	19
DPE-01.01.01.02.03. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.....	19
DPE-01.01.01.02.04. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	

Provinsi.....	20
DPE-01.01.01.02.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.....	20
DPE-01.01.01.02.06. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.....	20
DPE-01.01.01.02.07. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	21
DPE-01.01.01.03.01. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	21
DPE-01.01.01.03.02. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi.....	22
DPE-01.01.01.03.03. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	22
DPE-01.01.01.03.04. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.....	22
DPE-01.01.01.03.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	23
DPE-01.01.01.03.06. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	23
DPE-01.01.01.03.07. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	24
DPE-02.01.01.01.01. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elketronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.....	24
DPE-04.01.01.01.01. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	25
DPE-04.01.01.01.02. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.....	25
DPE-04.01.01.01.03. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang <i>Homestay</i> dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan.....	26
DPE-04.01.01.01.04. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	26
DPE-04.01.01.01.05. Pelatihan Asesor Kompetensi/ <i>Workplace Asesor</i> (WPA)	27
DPE-04.01.01.01.06. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ <i>Recognition Current Competencies</i> (RCC).....	27
DPE-07.01.01.01. Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai	28
DPE-07.01.01.02. Kenaikan Pangkat dan Pensiunan ASN	28
DPE-07.01.01.03. Disiplin Pegawai	29
DPE-07.01.01.04. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	29
DPE-08.01.01.01. Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet	30

DPE-08.01.01.02.	Pengelolaan Website, aplikasi E-Monev, aplikasi SIPD, aplikasi PPID, aplikasi Perizinan OSS, aplikasi E-Nadi ...	30
DPE-08.01.01.03.	Penyediaan Database Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	31
DPE-09.01.01.01.	Penatausahaan Keuangan	31
DPE-09.01.01.02.	Perencanaan dan Pelaporan	32
DPE-019.01.01.01.	Pelaksanaan SPIP	32
DPE-019.01.01.02.	Pelaksanaan SMM ISO 9001:2015	33
DPE-011.01.01.01.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	33
DPE-011.01.01.02.	Terwujudnya Zona Integritas Lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	34
DPE-012.01.01.01.	Perencanaan dan Formasi Pegawai	35



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 8 November 2022.
Nomor : Hk.03.7/511/2022.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

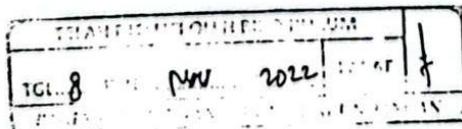
Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 065/27/BO2.1 tanggal 14 Juli 2022, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksud, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan itu, mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Naskah Keputusan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan limpah terima kasih.

Pt. Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Johanna E. Lisapaly, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640110 198903 2 015





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : rb.nttprov.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Tanggal : /4 Juli 2022
Nomor : 065 /27/BO2.1
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi
~~Sekretariat Daerah~~ Provinsi NTT, 

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP-196606241986022006



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 356 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 NOVEMBER 2022

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V2
Viktor Bungtilu Laiskodat

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PETA PROSES BISNIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
	kualitas sumber daya manusia	pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

III. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Provinsi NTT periode 2018 – 2023, telah menetapkan Visi Pemerintah Provinsi NTT yaitu : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur. Dalam semangat inilah maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam gerak pembangunan secara teknis berkontribusi mewujudkan masyarakat sejahtera dengan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah roh penggerak, yang berusaha menggambarkan tentang arah pola gerak pembangunan Nusa Tenggara Timur, dengan pola gerak yang ekstrim yakni Bangkit. Visi NTT Bangkit, mau mengandaikan bahwa apapun kondisi NTT saat ini, pada kuadran manapun NTT saat ini, harus menjadi titik nol atau titik berangkat, yang melecut sekaligus melontarkan kita pada keadaan Bangkit, Bangun, Berdiri dari

sebuah posisi yang mati, tak berdaya, miskin faedah, dan kondisi keterbatasan lainnya. Sejahtera mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur. Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Misi pembangunan Pariwisata Nusa Tenggara Timur, dalam Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berada pada Misi-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty). Sejalan dengan tekad Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yang menjadikan Pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan NTT, Pariwisata diandaikan sebagai lokomotif yang diyakini memiliki daya ungkit sekaligus daya tarik yang mampu menarik gerbong pembangunan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, maka dalam konteks Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, semua sektor harus secara bersamasama mendukung pembangunan pariwisata. Konsep pembangunan dari sektor terkait, harus dirancang memenuhi cita rasa pariwisata, dan memenuhi kebutuhan pariwisata.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

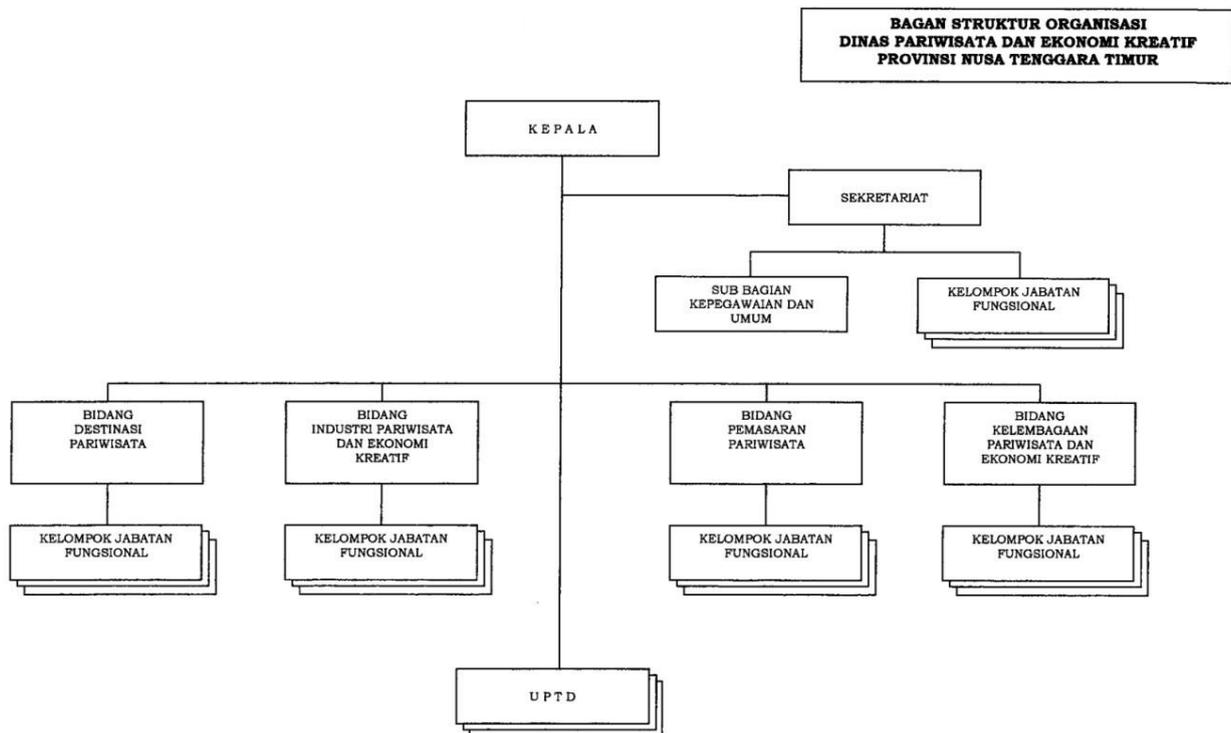
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unsur pelaksana bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas dan fungsi yang diberikan sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
2. Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
 - c. Sub Koordinator Substansi Keuangan
3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
 - a. Sub Koordinator Substansi Sarana Prasarana
 - b. Sub Koordinator Substansi Pengemabangan Atraksi Wisata Alam
 - c. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan
4. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan ekonomi Kreatif
 - a. Sub Koordinator Substansi Industri Pariwisata
 - b. Sub Koordinator Substansi Usaha ekonomi Kreatif
 - c. Sub Koordinator Substansi Jaringan Pemasaran
5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Sub Koordinator Substansi Promosi Pariwisata
 - b. Sub Koordinator Substansi Analisa Pasar Pariwisata
 - c. Sub Koordinator Substansi Informasi Pemasaran Pariwisata
6. Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan ekonomi Kreatif
 - a. Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
 - b. Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - c. Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

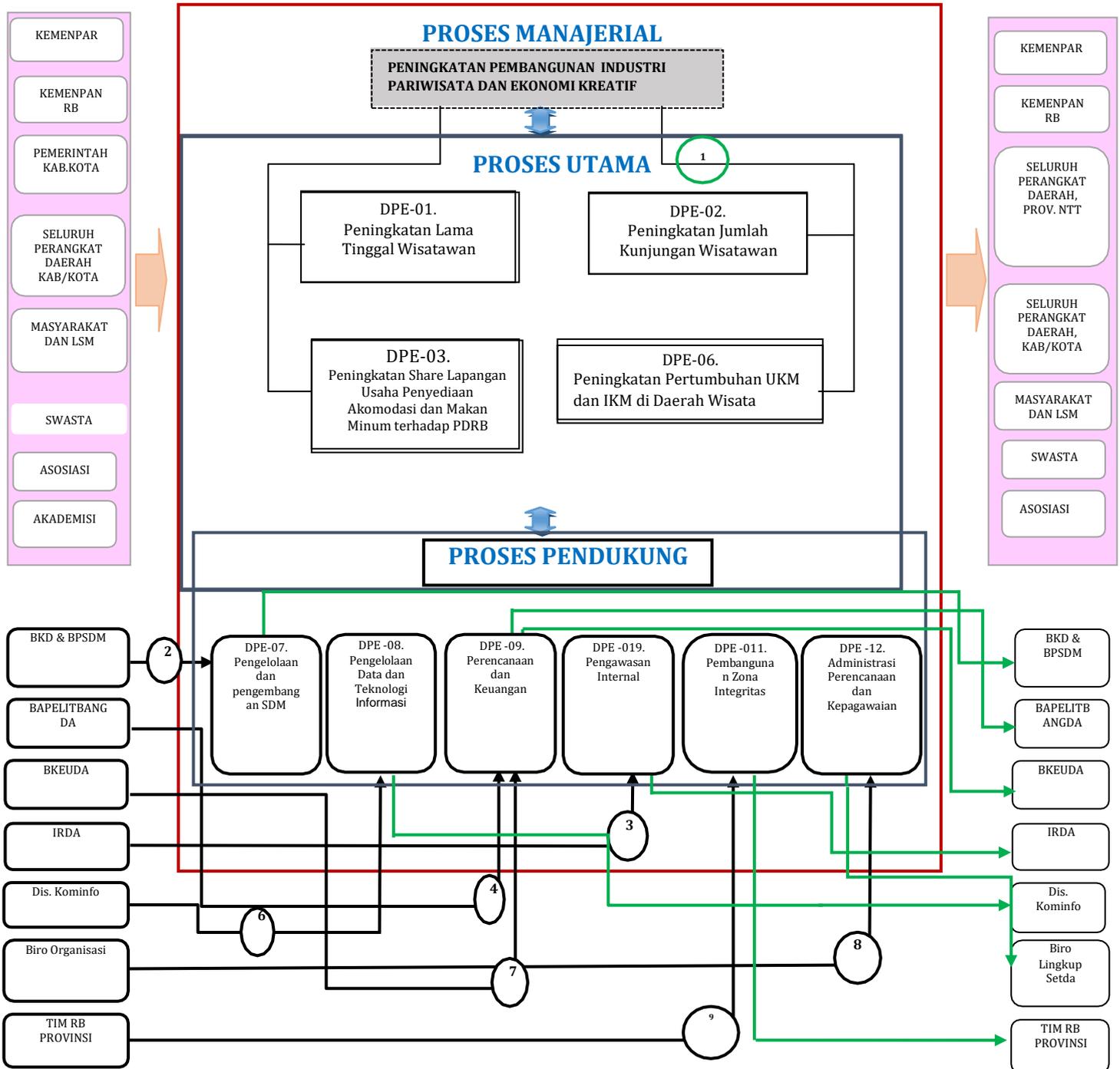


V. Peta Proses Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

A.PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor /KEP/HK/2022

Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.



Penjelasan Proses:

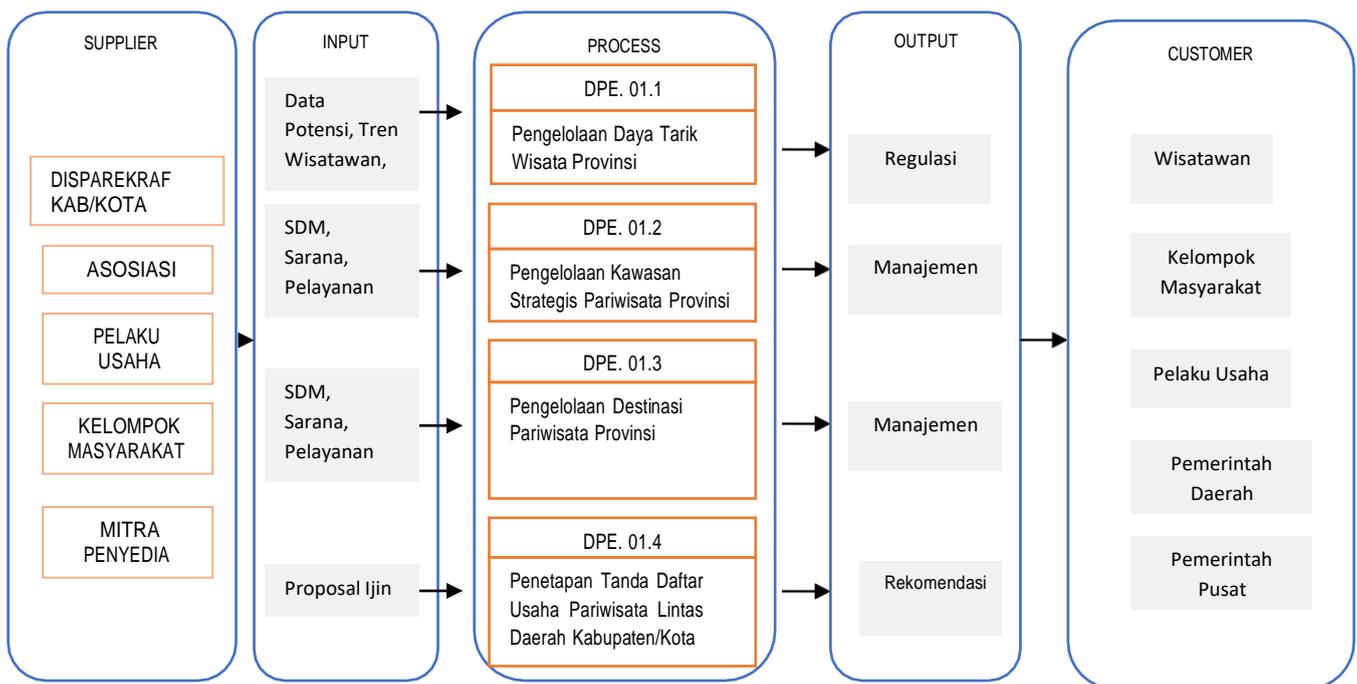
1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki empat target sasaran indikator dalam RPJMD
2. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
3. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
4. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
6. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
7. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
8. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
9. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output - Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

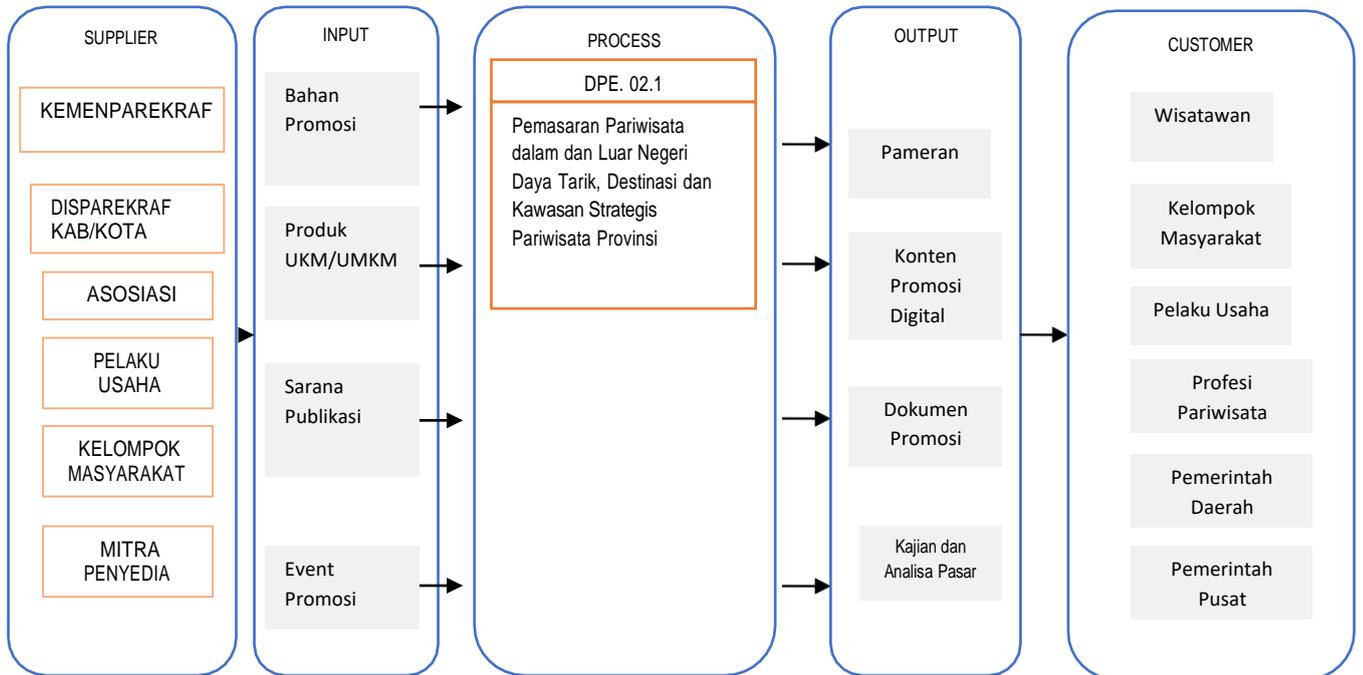
PETA SUB PROSES

DPE-01. PENINGKATAN LAMA TINGGAL WISATAWAN



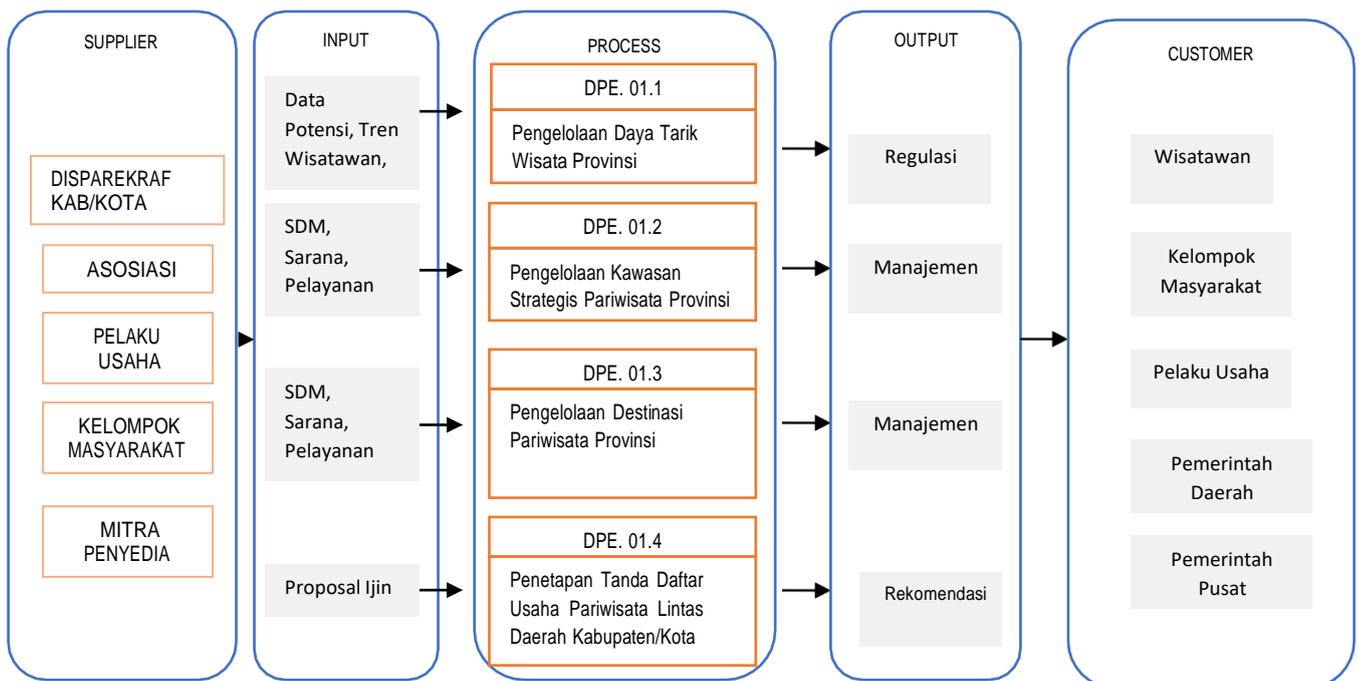
PETA SUB PROSES

DPE-02. PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN



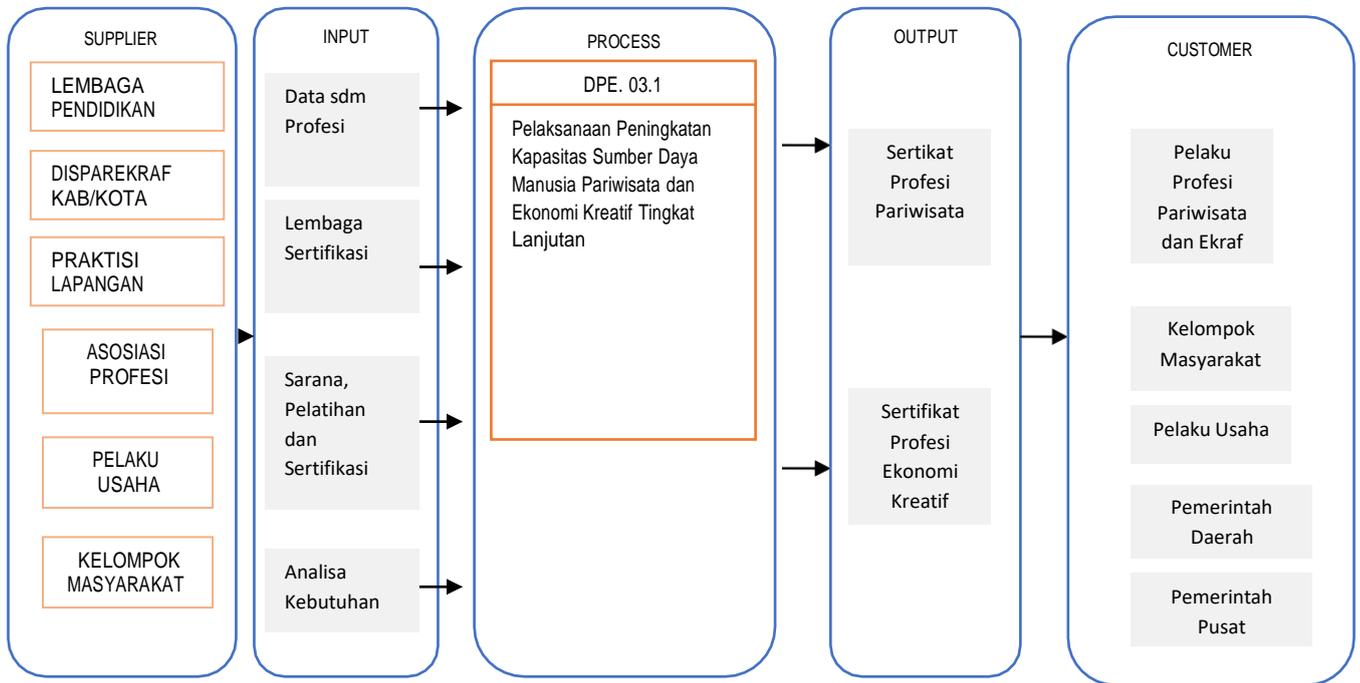
PETA SUB PROSES

DPE-03. PENINGKATAN SHARE LAPANGAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB



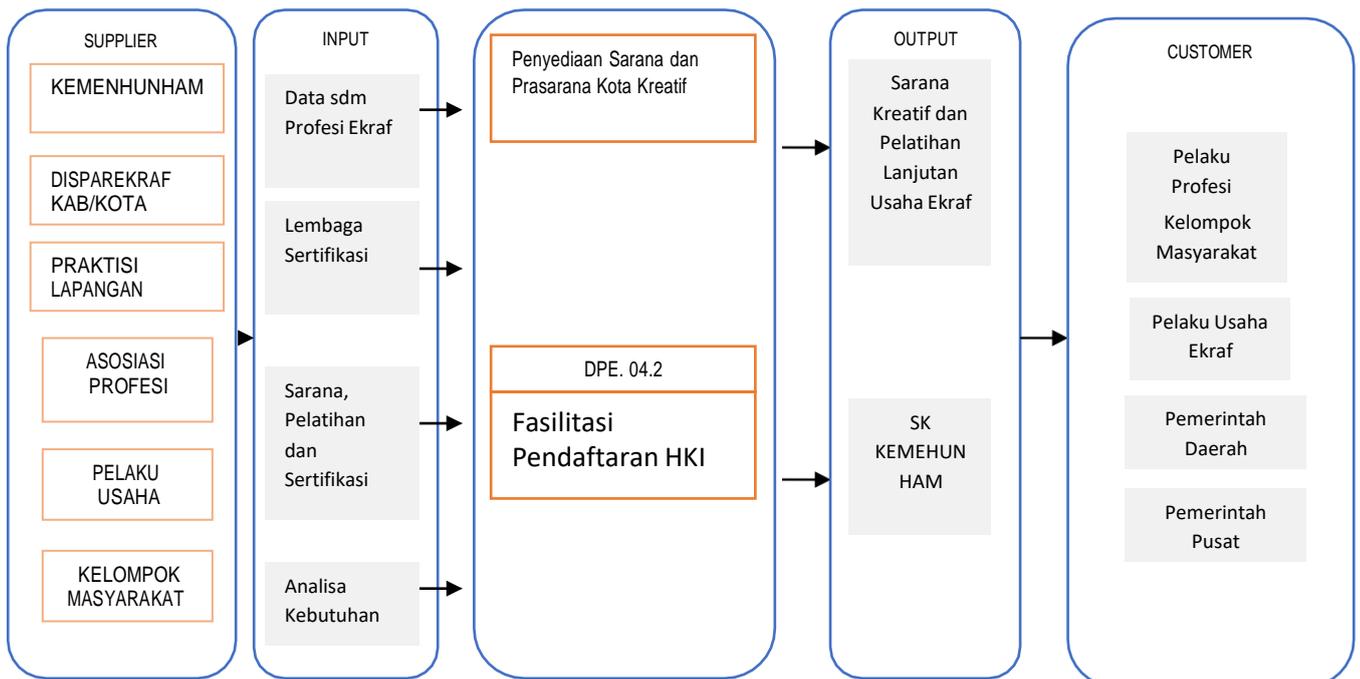
PETA SUB PROSES

DPE-03. PENINGKATAN SHARE LAPANGAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRB



PETA SUB PROSES

DPE-06. Peningkatan Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)



C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

PROSES DPE 01
 SUB PROSES DPE 01.01
 LINTAS FUNGSI DPE 01.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3								4	5	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi											
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA			BAPPELIT BANGDA	Surat Keputusan Gubernur Daya Tarik Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI	
2	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA	DLHD		BAPPELIT BANGDA	Grand desain, Master Plan, DED dan Kajian AMDAL/UKL-UPL	DISPAREKRAF PROVINSI	
3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN	PELAKU BISNIS PARIWISATA	DLHD		BAPPELIT BANGDA	Grand desain, Master Plan, DED dan Kajian AMDAL/UKL-UPL	DISPAREKRAF PROVINSI	
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN							Laporan Monev Pengelolaan	DISPAREKRAF PROVINSI	
	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provin											
1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN				DLHD	BAPPELIT BANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN				DLHD	BAPPELIT BANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN				DLHD	BAPPELIT BANGDA	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA	BPBJ	INSPEKTORAT					Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan	DISPAREKRAF PROVINSI

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT							OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
		3									4
	dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									Kawasan Strategis Provinsi	
5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN					DLHD	BAPPELIT BANGDA	Desain pengembangan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	LEMBAGA PENELITIAN					Tata kelola kawasan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat	DISPAREKRAF PROVINSI
7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELIT BANGDA	Konsep keberlanjutan pengelolaan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	LEMBAGA PENELITIAN	ASOSIASI PARIWISATA	DLHD	BAPPELIT BANGDA		DISPAREKRAF PROVINSI
2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELIT BANGDA	Desain Pembangunan Data Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN			DLHD	BAPPELIT BANGDA	Pengembangan destinasi pariwisata provinsi	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA	LEMBAGA PENELITIAN	BPBJ	INSPEKTORAT			Penambahan Amenitas, Akomodasi dan Atraksi	DISPAREKRAF PROVINSI
5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN		LEMBAGA PENELITIAN					Laporan Monev Pengelolaan	DISPAREKRAF PROVINSI
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KELOMPOK MASYARAKAT					Pengembangan kapasitas kelompok dan lembaga pengelola destinasi pariwisata provinsi	DISPAREKRAF PROVINSI
7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUP ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KELOMPOK MASYARAKAT					Penerapan pengelolaan wisata provinsi berkelanjutan	DISPAREKRAF PROVINSI
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
		3										
1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA					Tersedia layanan pendaftaran usaha lintas daerah	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA					Fasilitasi pelaku bisnis pariwisata dalam mengakses layanan pendaftaran usaha lintas daerah	BADAN PELAYANAN SATU ATAP
3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	BADAN PELAYANAN SATU ATAP	KEMENPAR REKRAF						Penambahan investasi pariwisata	BADAN PELAYANAN SATU ATAP

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 02
DPE 02.01
DPE 02.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENAGGUNG JAWAB	
		3										
1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	DISPAREKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERS		Penguatan promosi dan pemasaran produk daerah	DISPAREKRAF PROVINSI
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	DISPAREKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERS		Peningkatan kunjungan wisatawan dan bertambah rata-rata menginap	DISPAREKRAF PROVINSI
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	DISPAREKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM			Kemudahan akses informasi	DISPAREKRAF PROVINSI
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	DISPAREKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR REKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	BIRO KERJASAMA	PERINDAG	Kerjasama lintas sektor	DISPAREKRAF PROVINSI

PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

DPE 02
DPE 02.01
DPE 02.01.01

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT								OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
		3										
1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERS			Penguatan promosi dan pemasaran produk daerah	DISPAR EKRAF PROVINSI
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN ATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERS			Peningkatan kunjungan wisatawan dan bertambah rata-rata menginap	DISPAR EKRAF PROVINSI

3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM			Kemudahan akses informasi	DISPAR EKRAF PROVINSI
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPAR EKRAF PROVINSI	DISPAR EKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	BIRO KERJA SAMA	PERINDAG	Kerjasama lintas sektor	DISPAR EKRAF PROVINSI

**PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI**

**DPE 04
DPE 04.01
DPE 04.01.01**

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT							OUTPUT	PENAGGUNGJAWAB
1	2	3							4	5
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Pelatihan tingkat lanjutan /pra sertifikasi	DISPAR EKRAF PROVINSI
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Legalitas pengelolaan kelembagaan/Akta notaris dan terdaftar Kemenh umham	DISPAR EKRAF PROVINSI
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA			Jumlah sertifikasi profesi bidang home stay dan pemandu wisata	DISPAR EKRAF PROVINSI
4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM		Sertifikasi profesi pariwisata dan ekonomi kreatif	DISPAR EKRAF PROVINSI
5	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM		Sertifikasi asesor	DISPAR EKRAF PROVINSI
6	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM		Jumlah perpanjangan lisensi asesor	DISPAR EKRAF PROVINSI
7	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM		Terbentuk LSP bidang pariwisata	DISPAR EKRAF PROVINSI
8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERINDAG	Peningkatan kualitas produk dan pasar	DISPAR EKRAF PROVINSI
9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISPA REKRAF PROVINSI	DISPA REKRAF KABUPATEN	ASOSIASI PARIWISATA	KEMENPAR EKRAF	PELAKU BISNIS PARIWISATA	IKM/UMKM	PERINDAG	Peningkatan kompetensi pelaku ekraf	DISPAR EKRAF PROVINSI

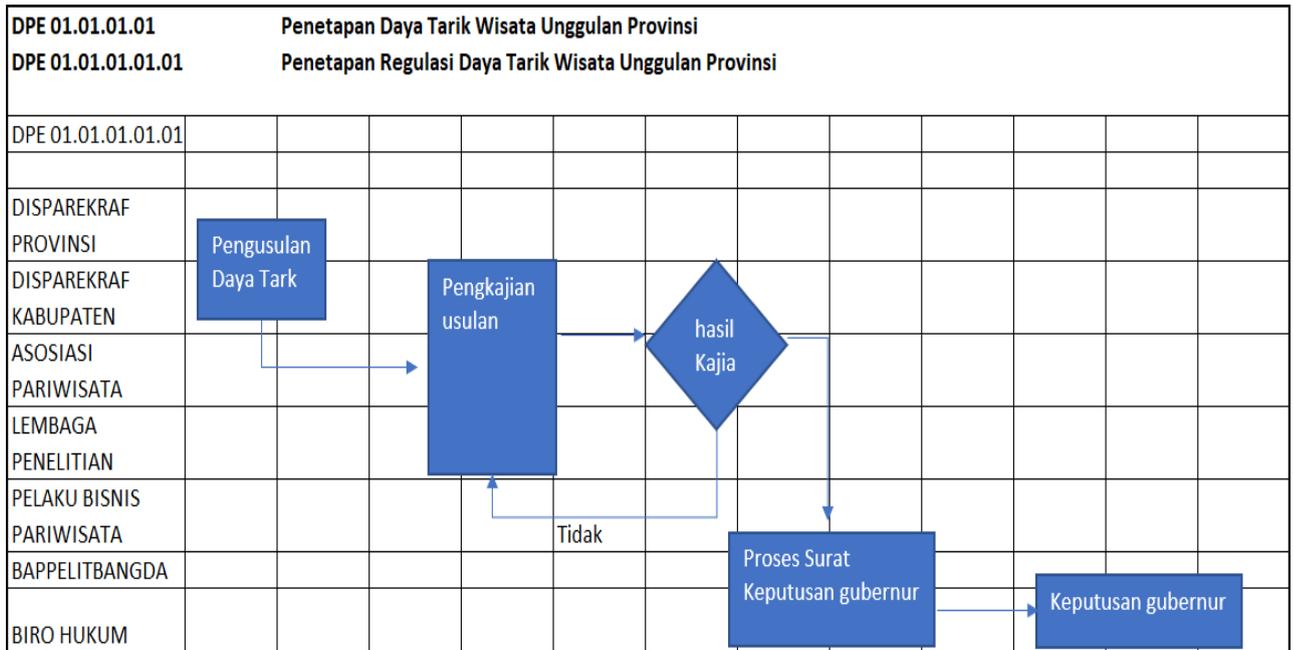
PROSES
SUB PROSES
LINTAS FUNGSI

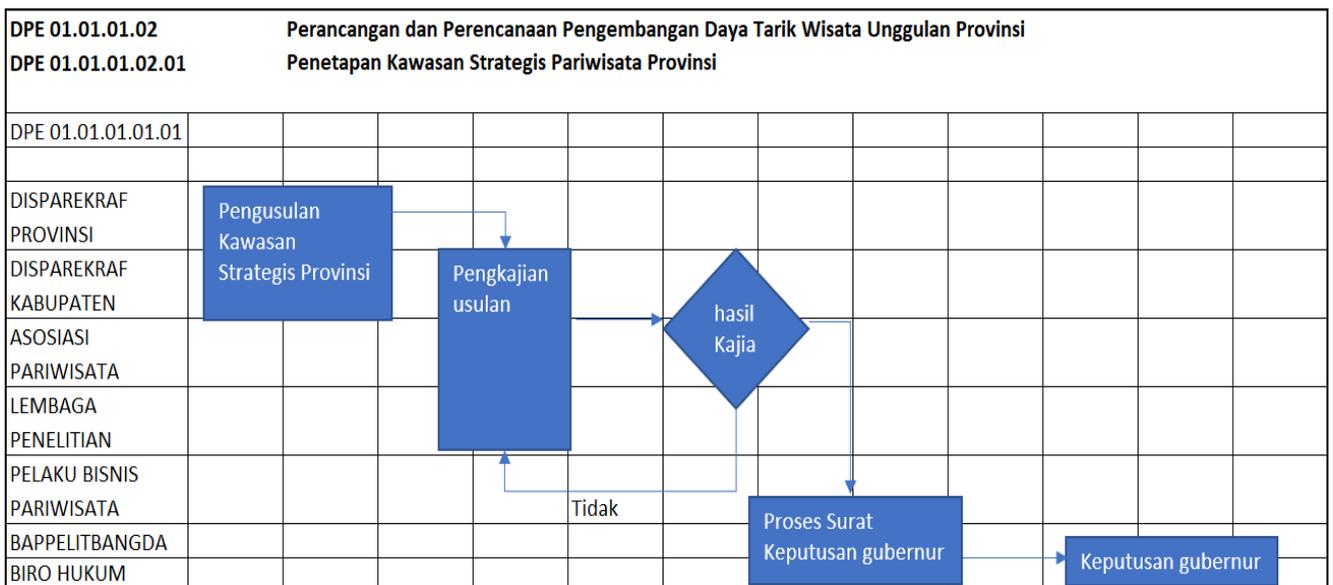
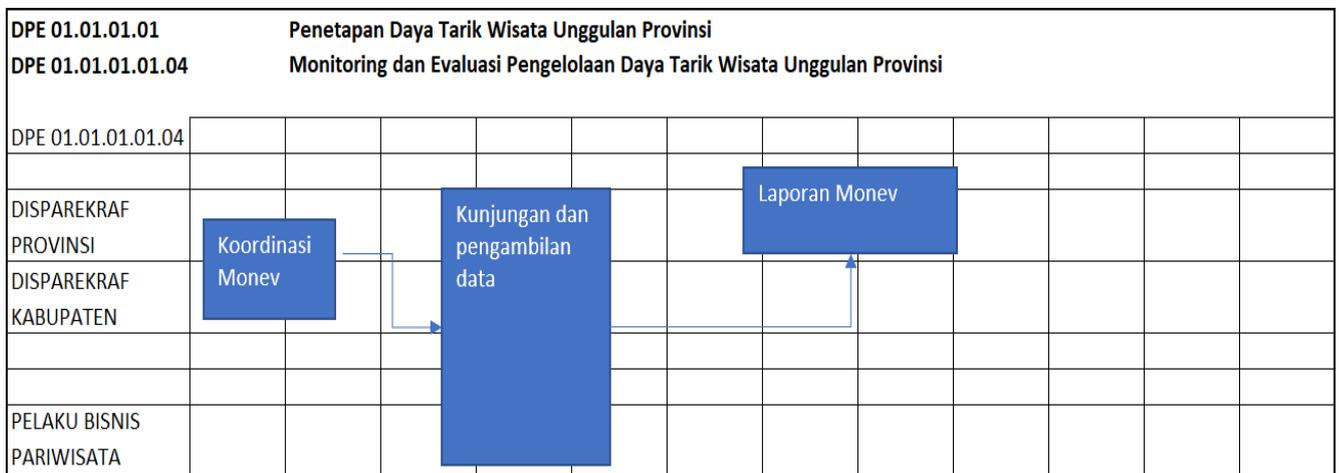
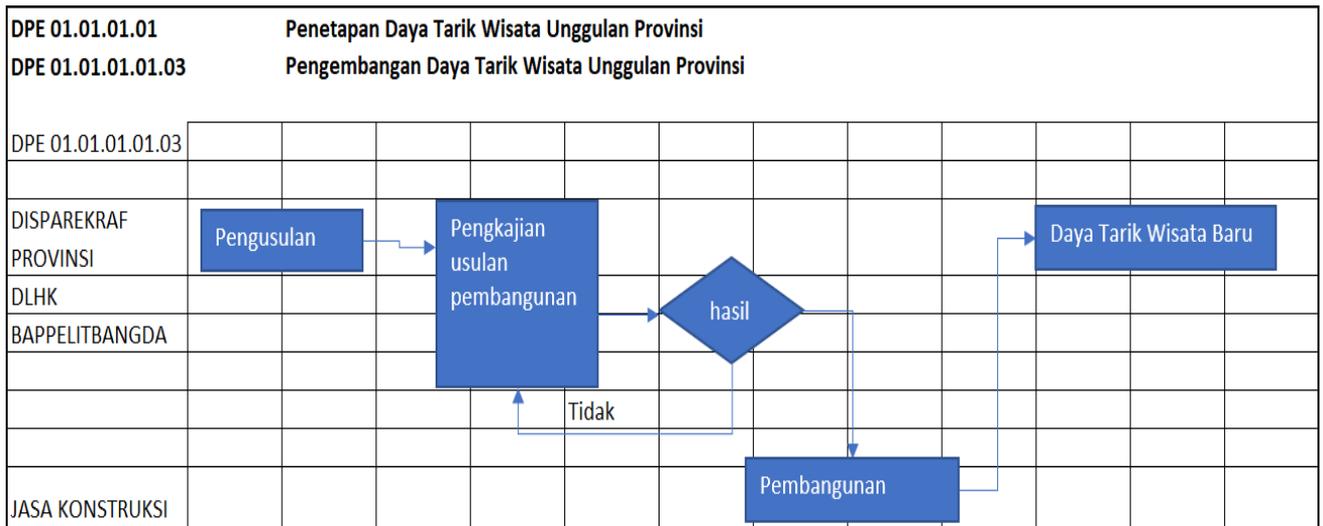
DPE 06
DPE 06.01
DPE 06.01.01

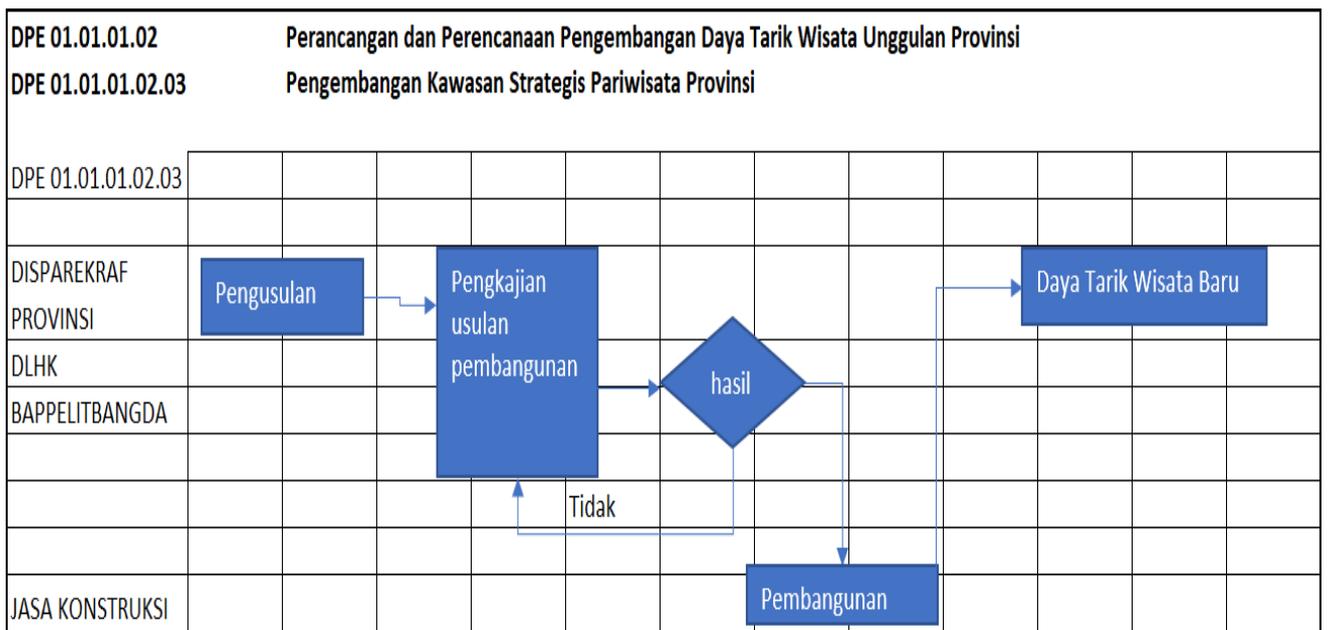
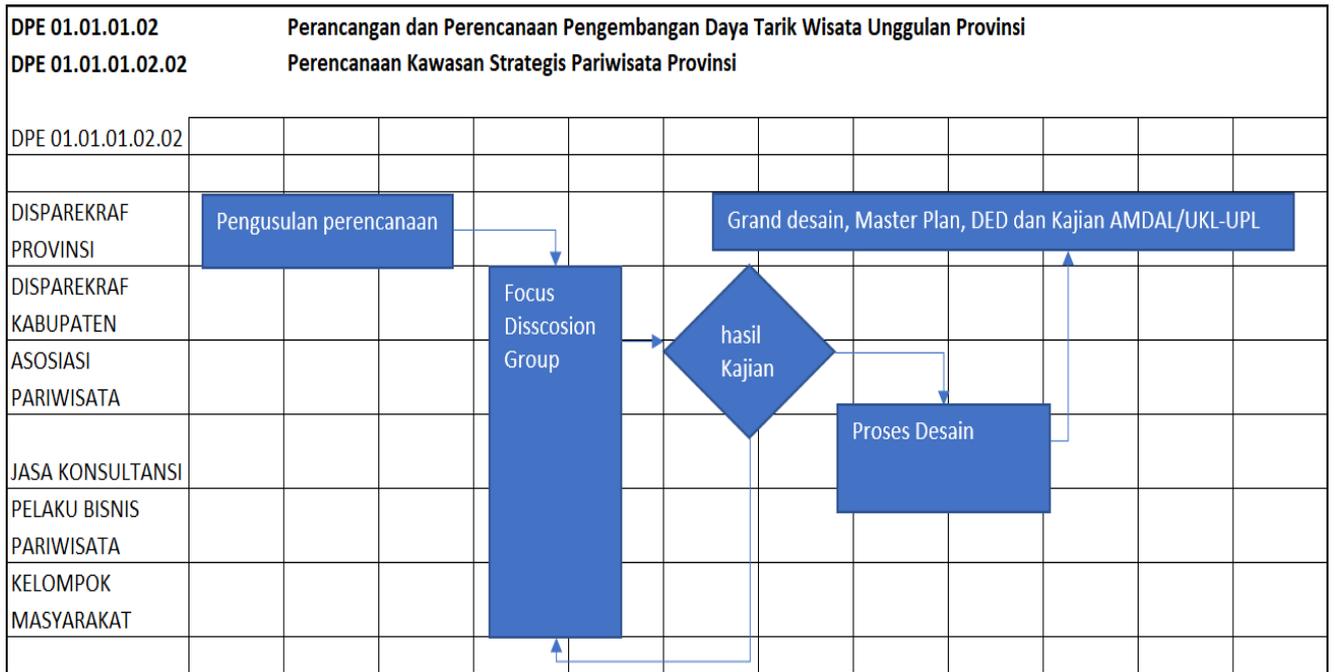
NO	KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT							OUTP UT	PENAG GUNGJ AWAB
		3								
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									
1	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	DISP ARE KRAF PRO VINSI	DISP ARE KRAF KAB UPAT EN	ASO SIAS I PARI WIS ATA DAN EKRA AF	KEME NPARE KRAF	PEL AKU BIS NIS PARI WIS ATA	IKM /U MK M	KEME NHUN HAM	Peng emban gan IKM/ UMK M bidan g Ekraf dan Pend aftar an HKI dan IG	DISPAR EKRAF PROVIN SI
2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar	DISP ARE KRAF PRO VINSI	DISP ARE KRAF KAB UPAT EN	ASO SIAS I PARI WIS ATA DAN EKRA AF	KEME NPARE KRAF	PEL AKU BIS NIS PARI WIS ATA	IKM /U MK M	KEME NHUN HAM	Penin gkata n jumlah h penju alan IKM/ UMK M ekraf	DISPAR EKRAF PROVIN SI
3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	DISP ARE KRAF PRO VINSI	DISP ARE KRAF KAB UPAT EN	ASO SIAS I PARI WIS ATA DAN EKRA AF	KEME NPARE KRAF	PEL AKU BIS NIS PARI WIS ATA	IKM /U MK M	KEME NHUN HAM	Peng emban gan kemit raan dan wada h kreati f IKM/ UMK M	DISPAR EKRAF PROVIN SI
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	DISP ARE KRAF PRO VINSI	DISP ARE KRAF KAB UPAT EN	ASO SIAS I PARI WIS ATA DAN EKRA AF	KEME NPARE KRAF	PEL AKU BIS NIS PARI WIS ATA	IKM /U MK M	KEME NHUN HAM	Penin gkata n nilai tambah prod uk	DISPAR EKRAF PROVIN SI
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	DISP ARE KRAF PRO VINSI	DISP ARE KRAF KAB UPAT EN	ASO SIAS I PARI WIS ATA DAN EKRA AF	KEME NPARE KRAF	PEL AKU BIS NIS PARI WIS ATA	IKM /U MK M	KEME NHUN HAM	Penin gkata n kapa sitas dasar dan pemb erian insen tif	DISPAR EKRAF PROVIN SI

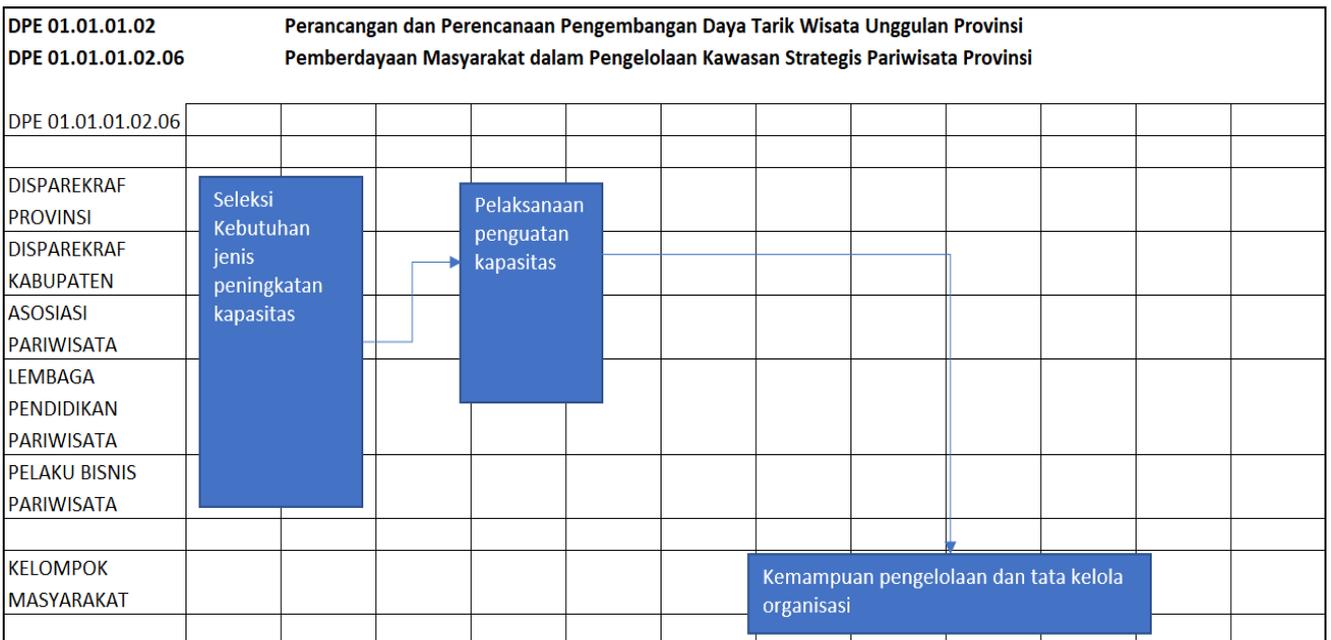
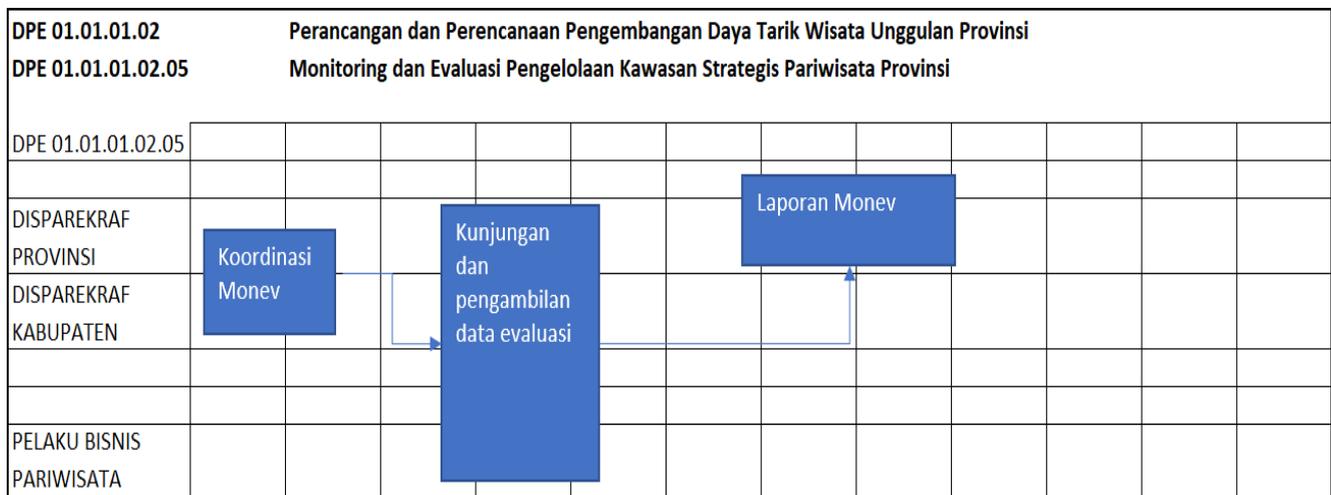
D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

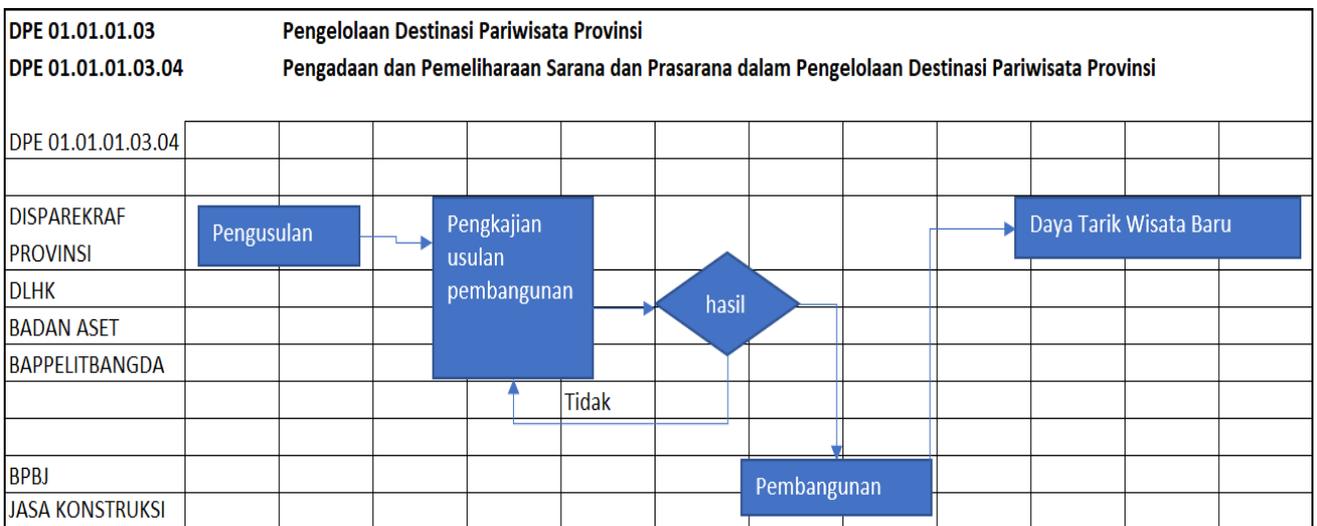
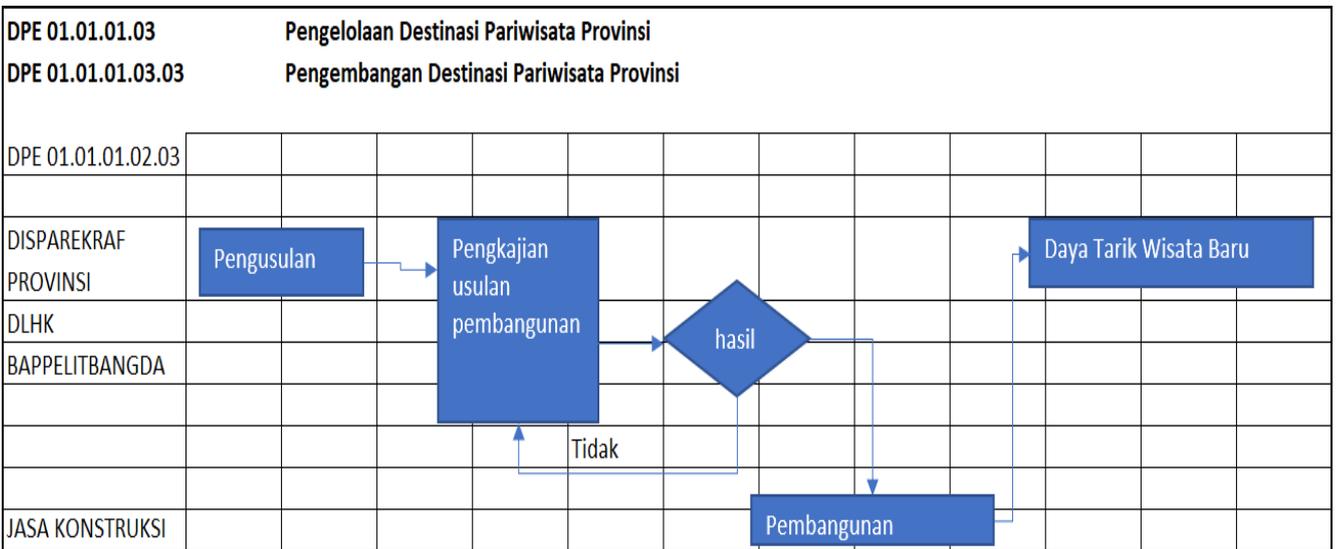
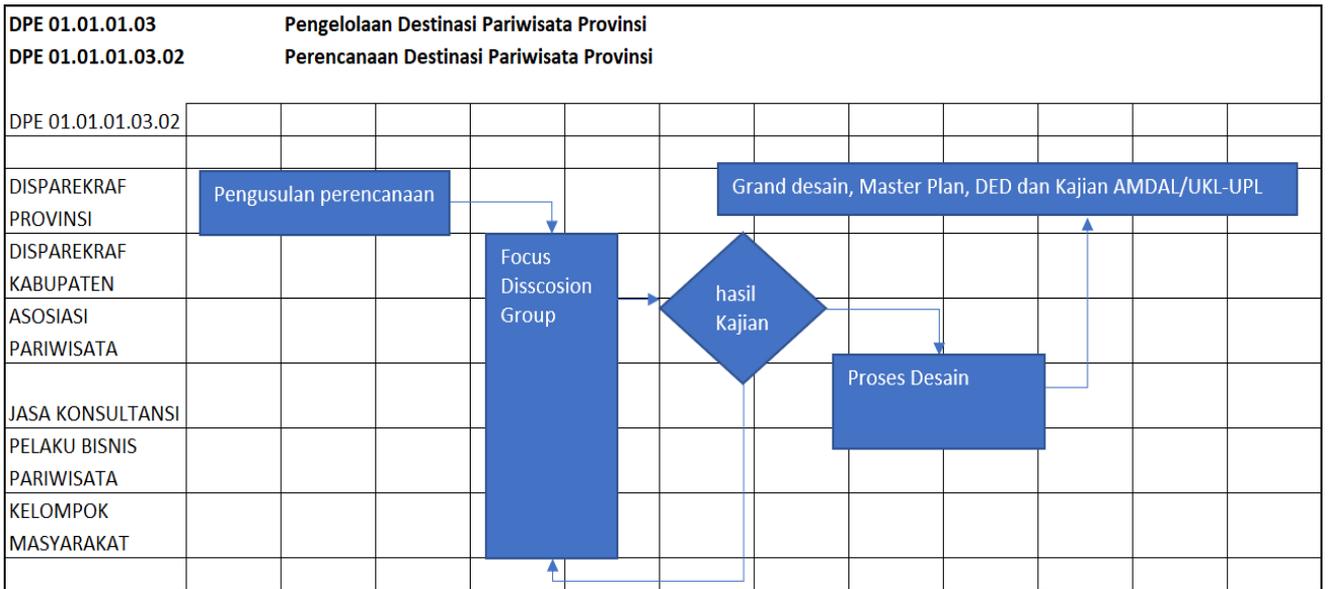
Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Pariwisata dan Eoknomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

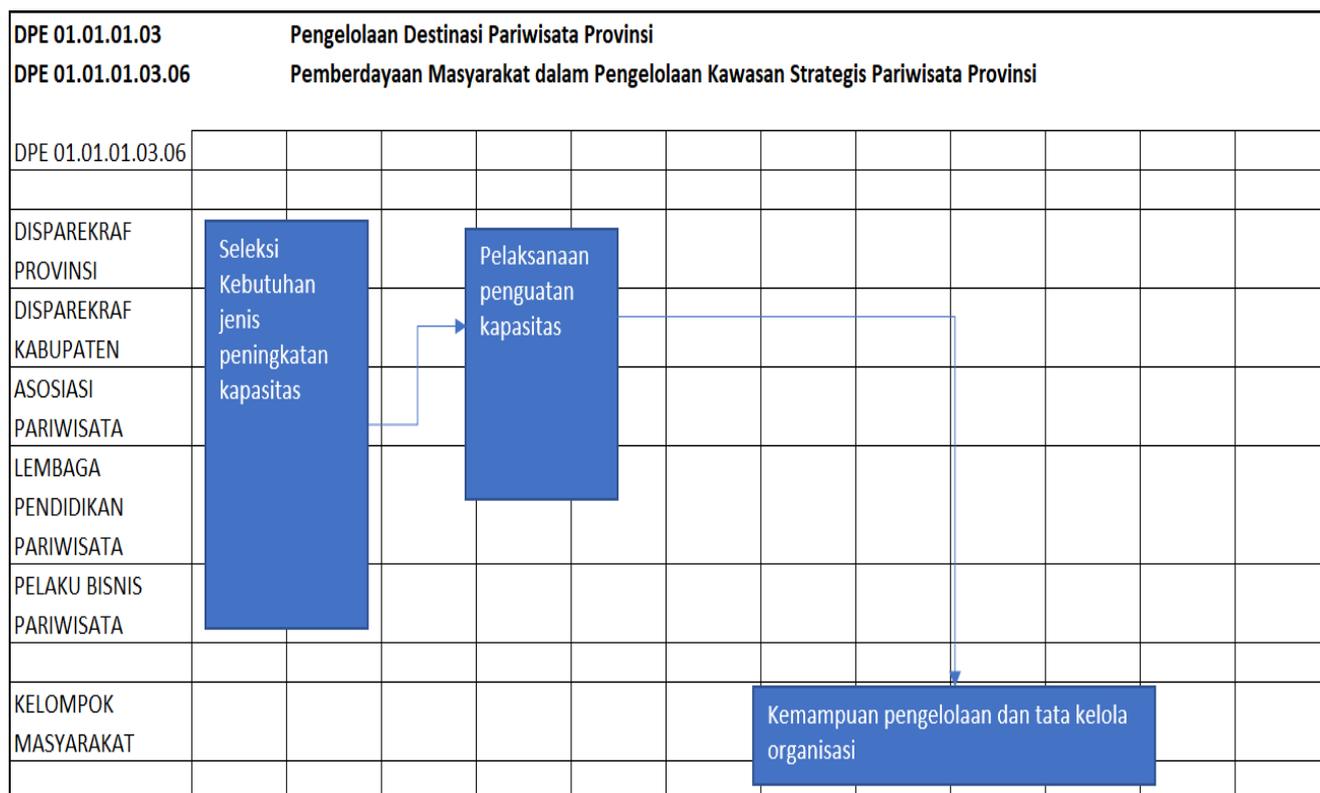
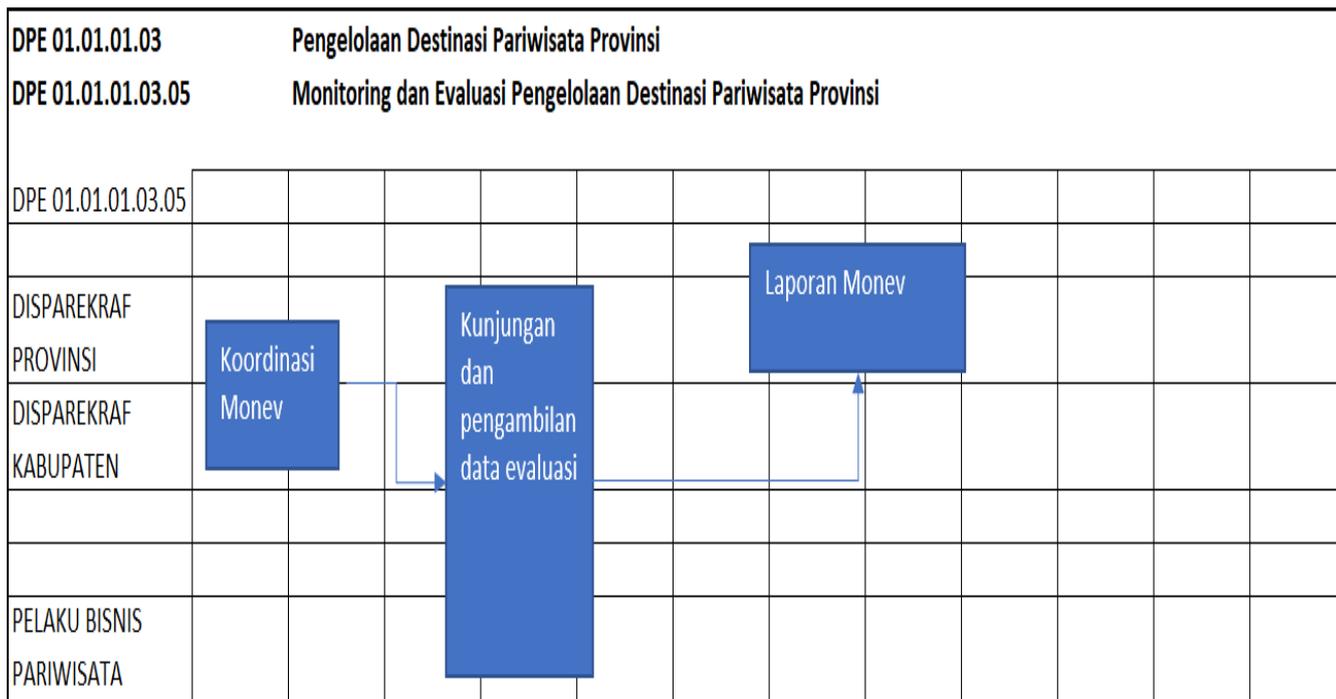


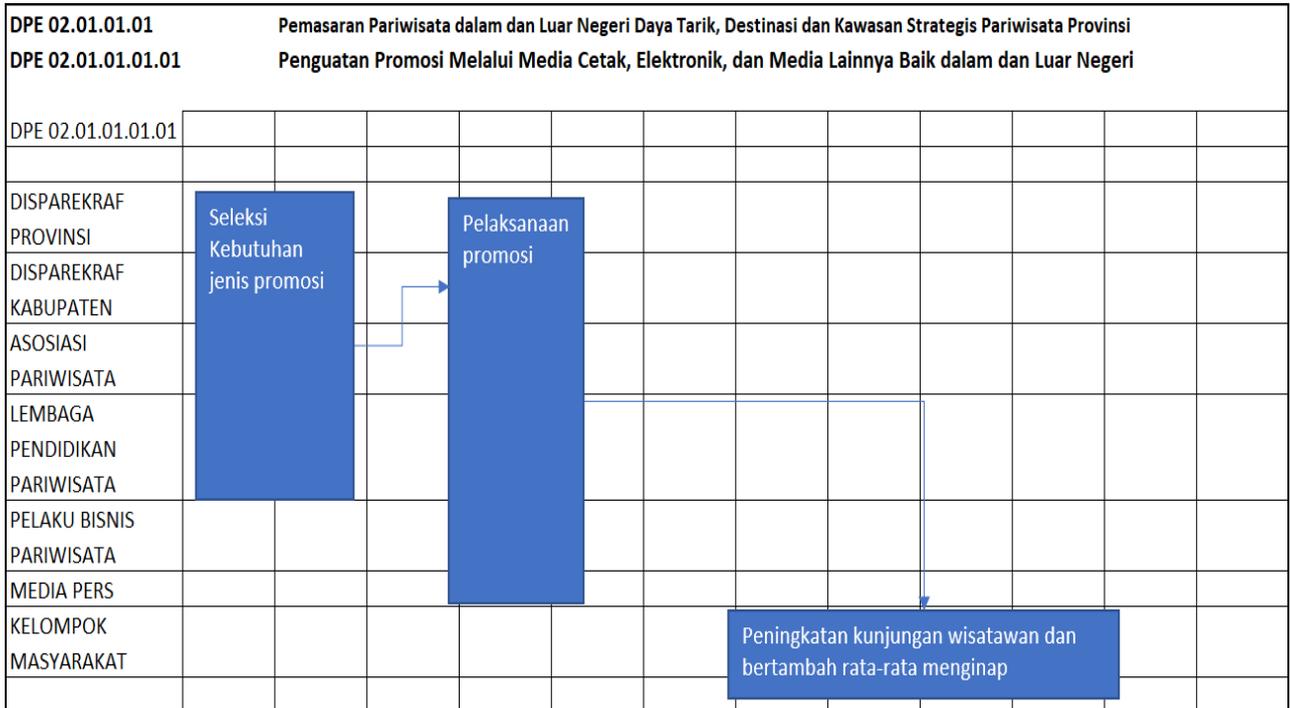
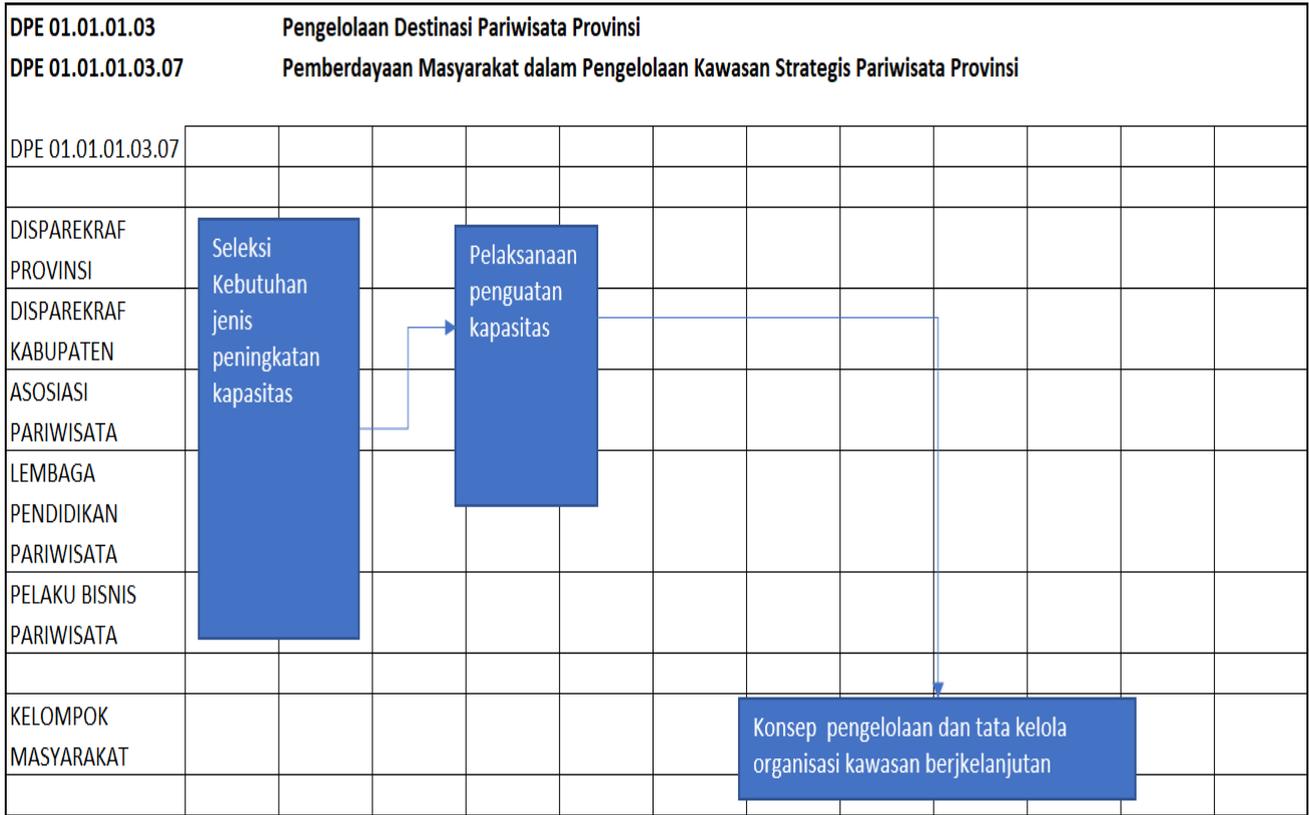


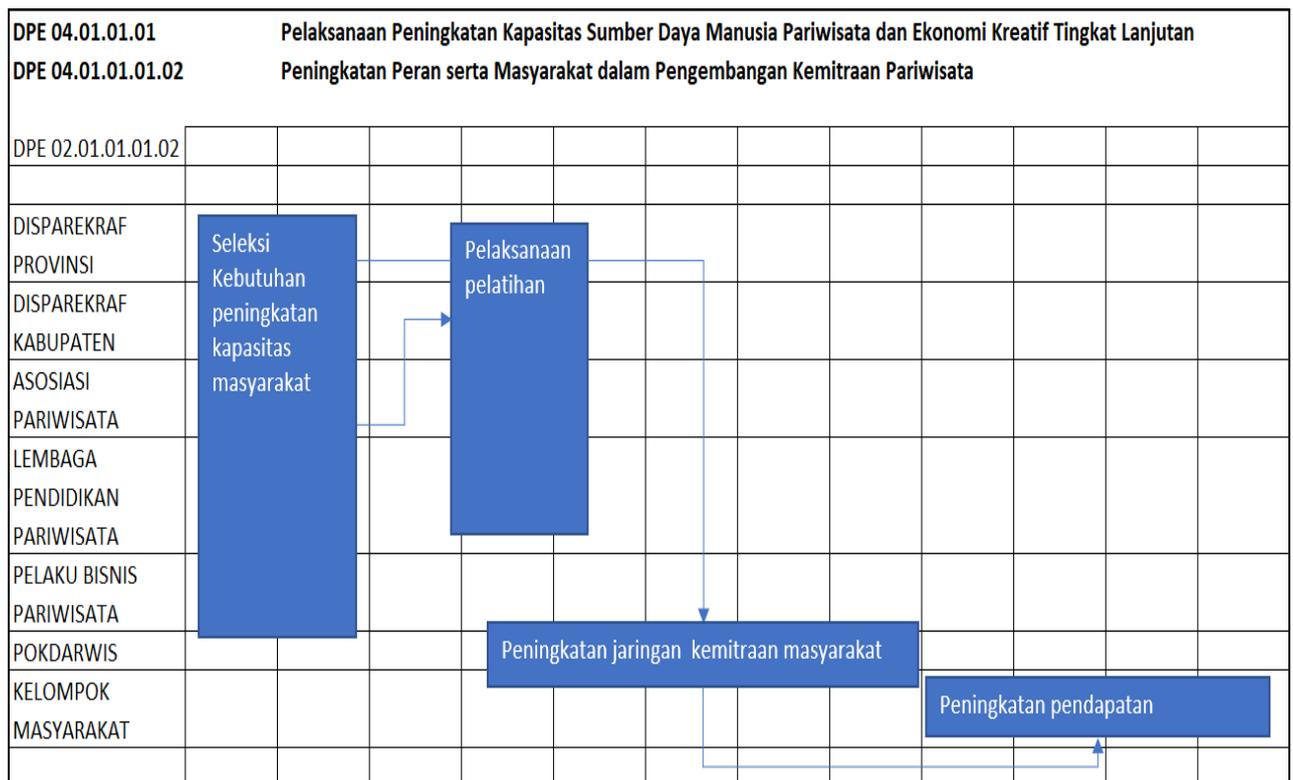
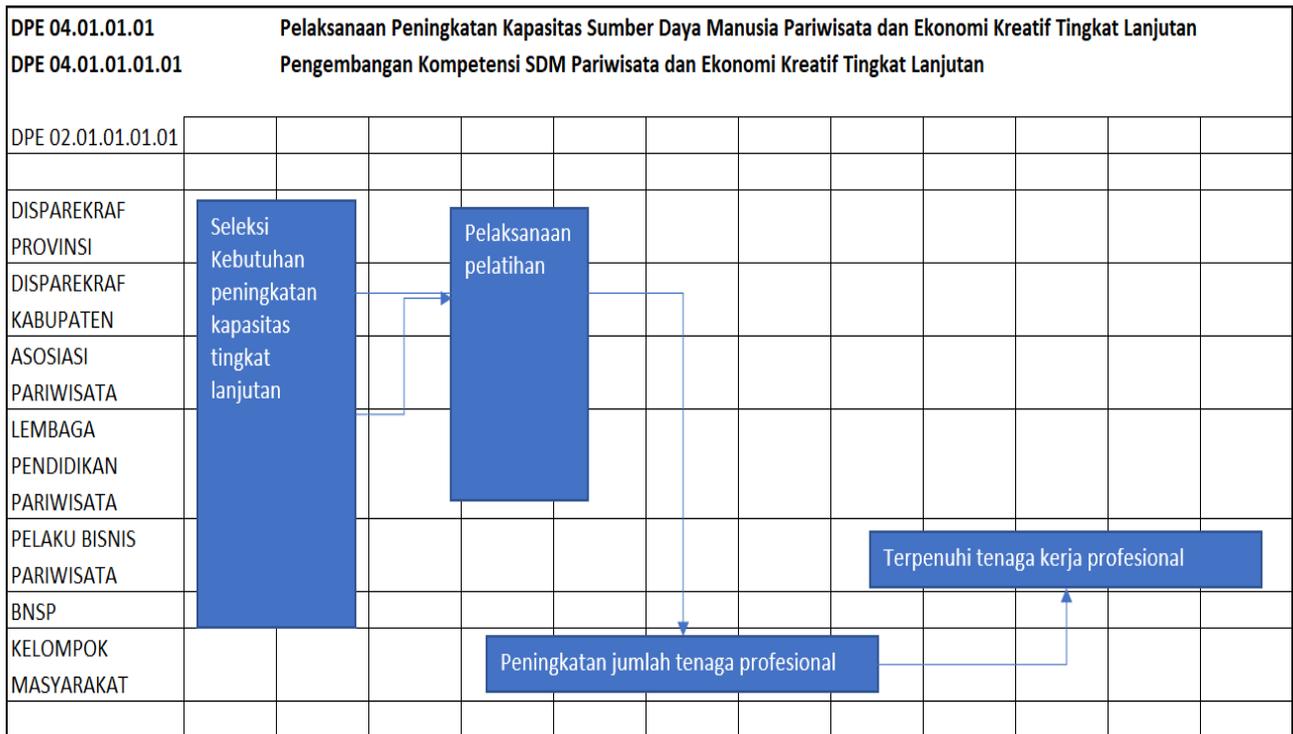


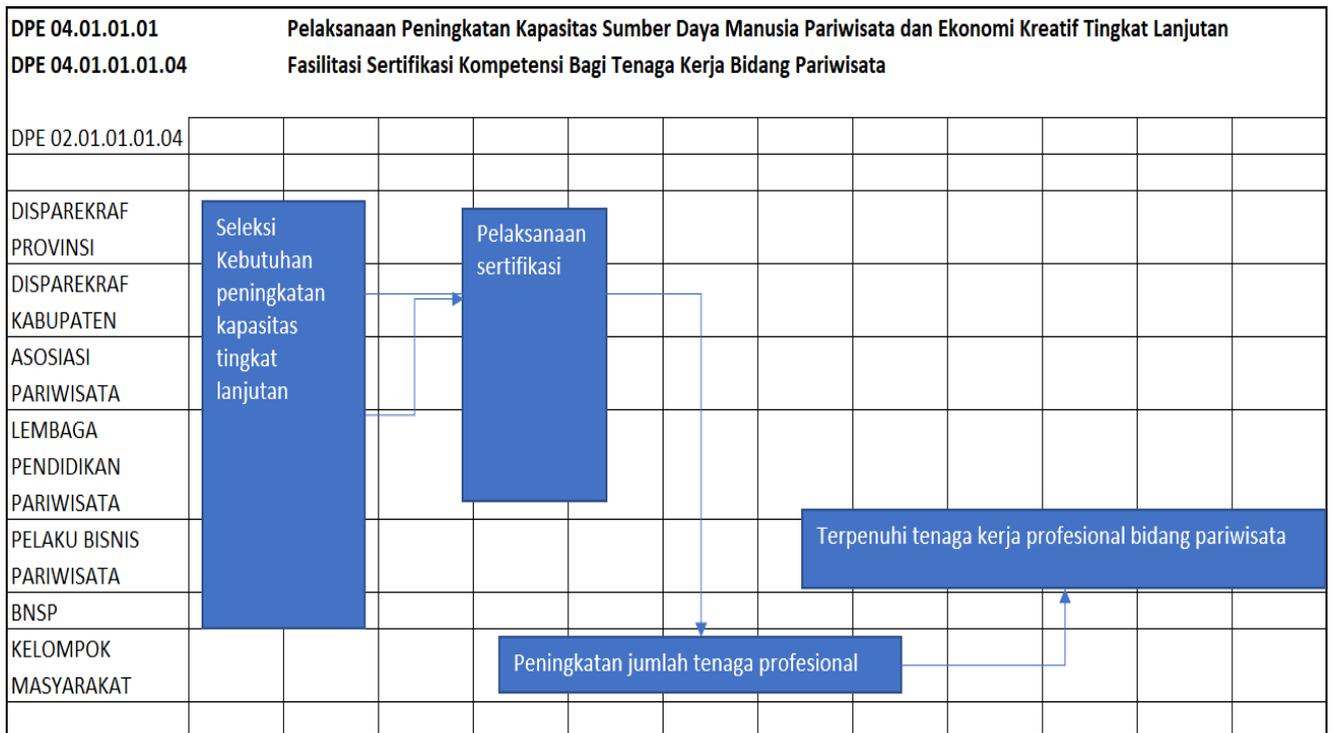
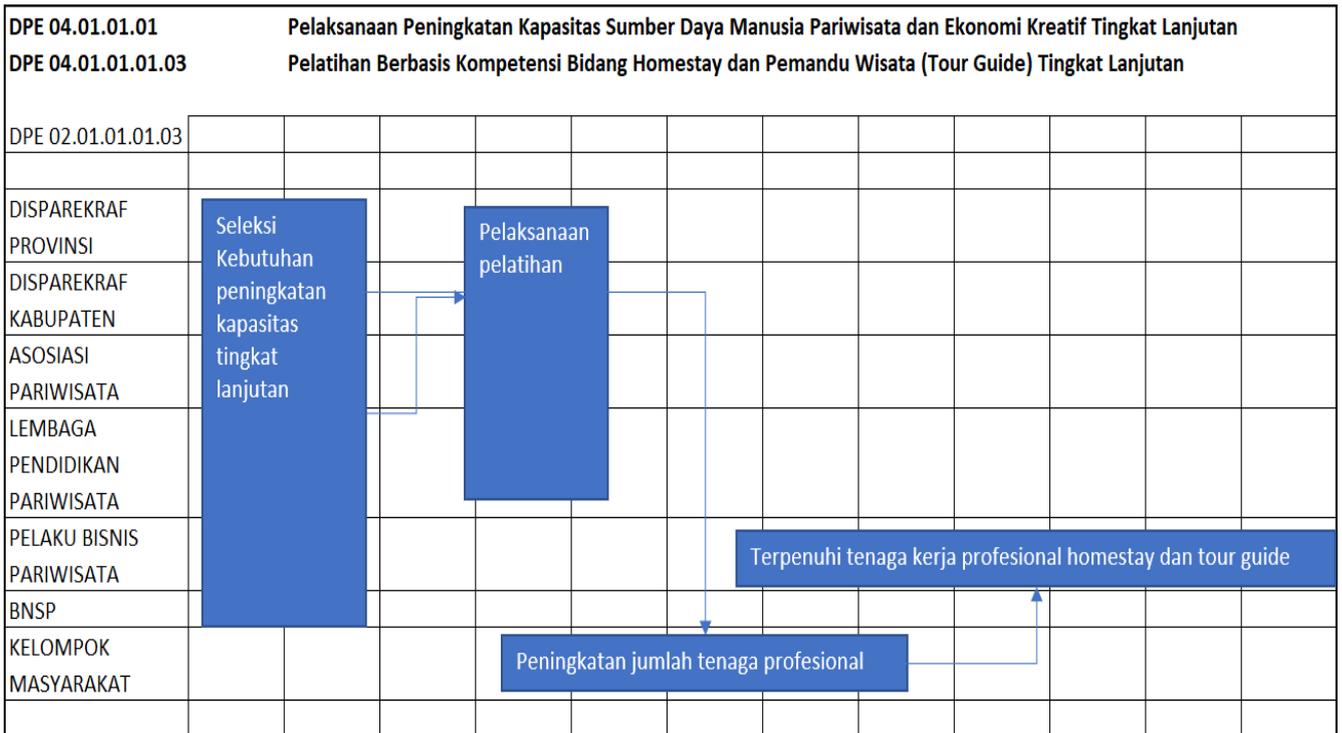


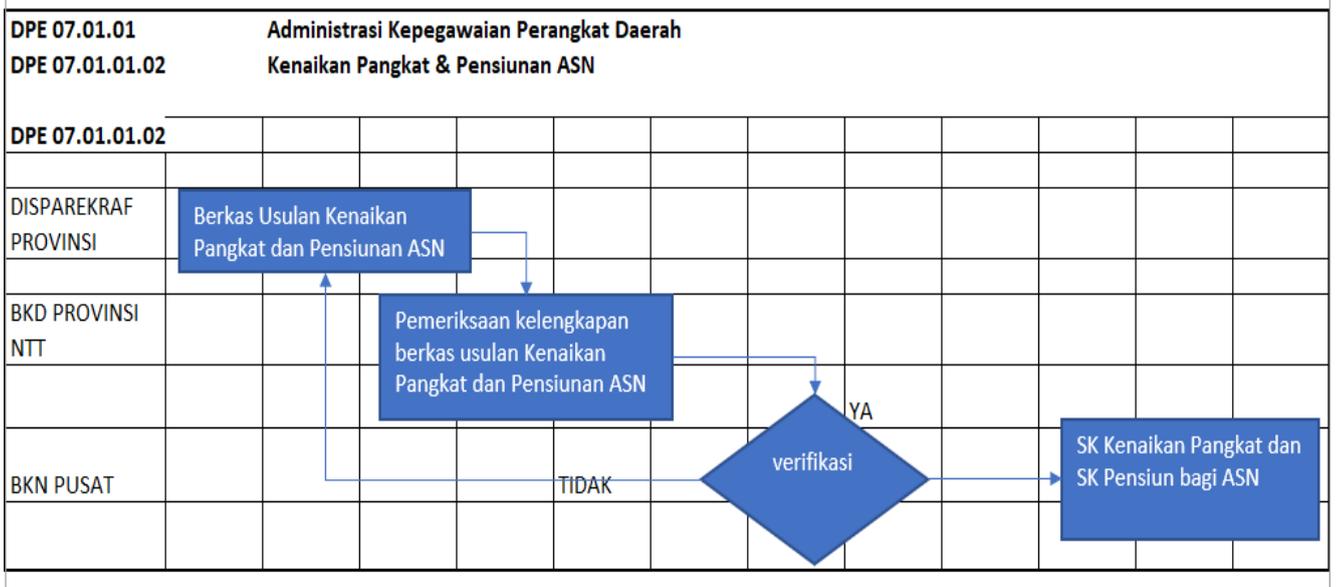
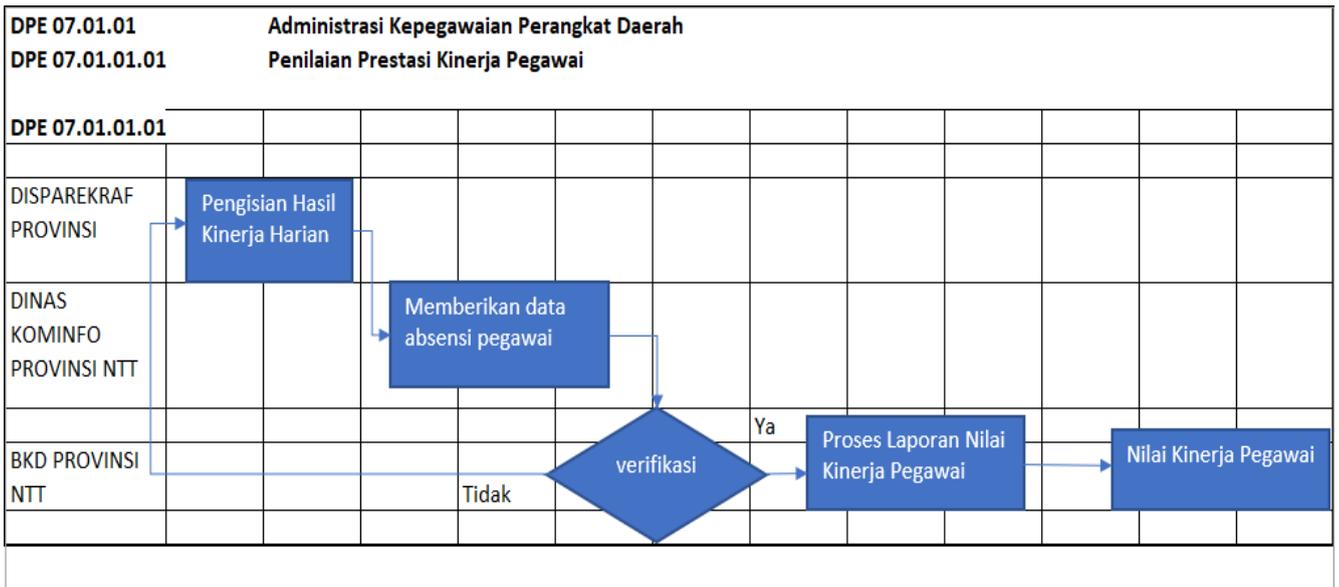


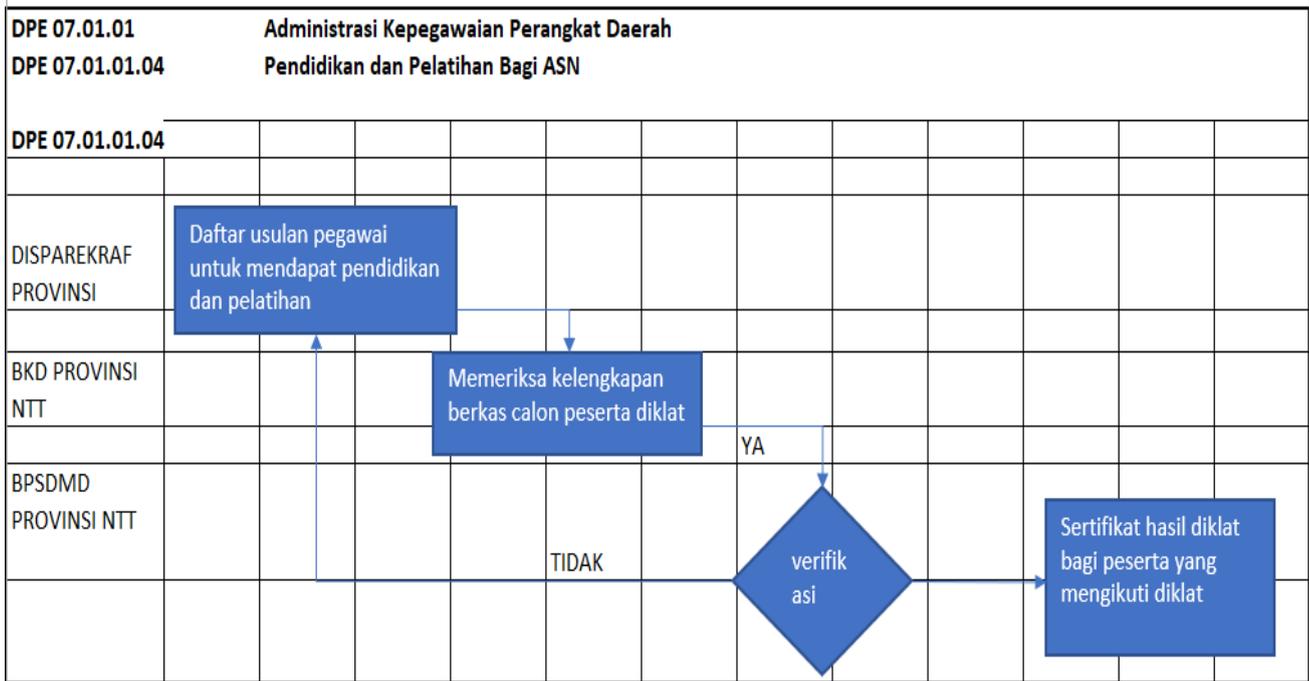
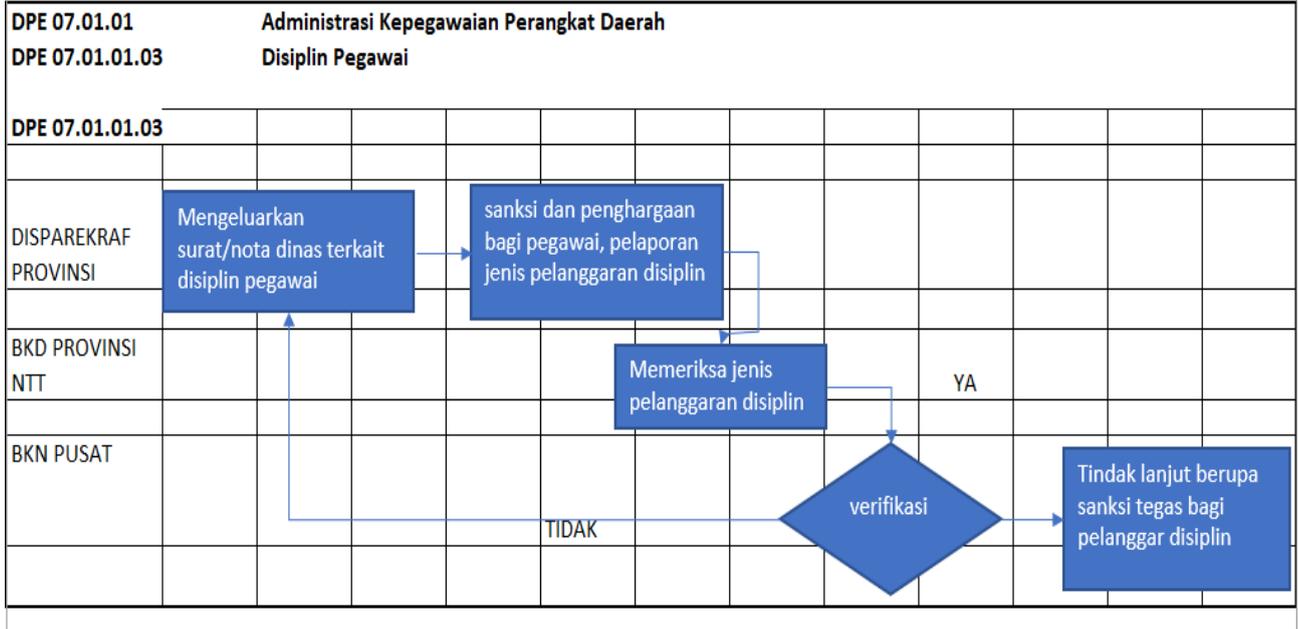


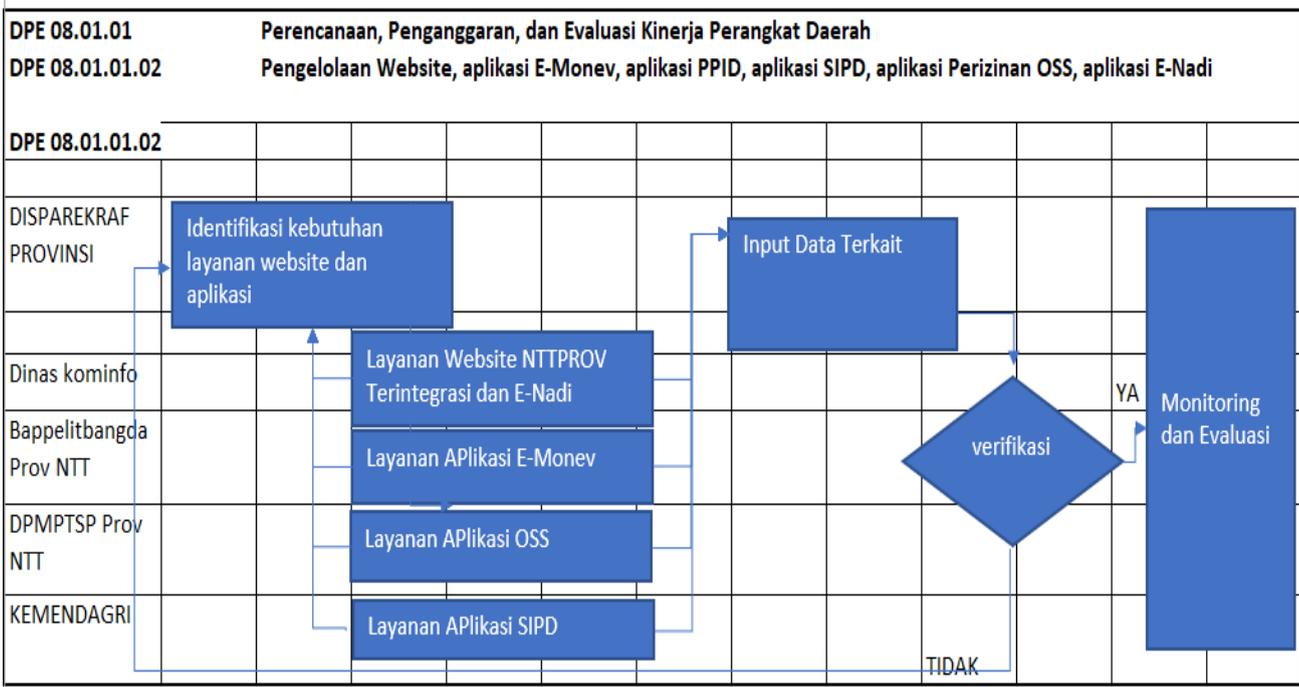
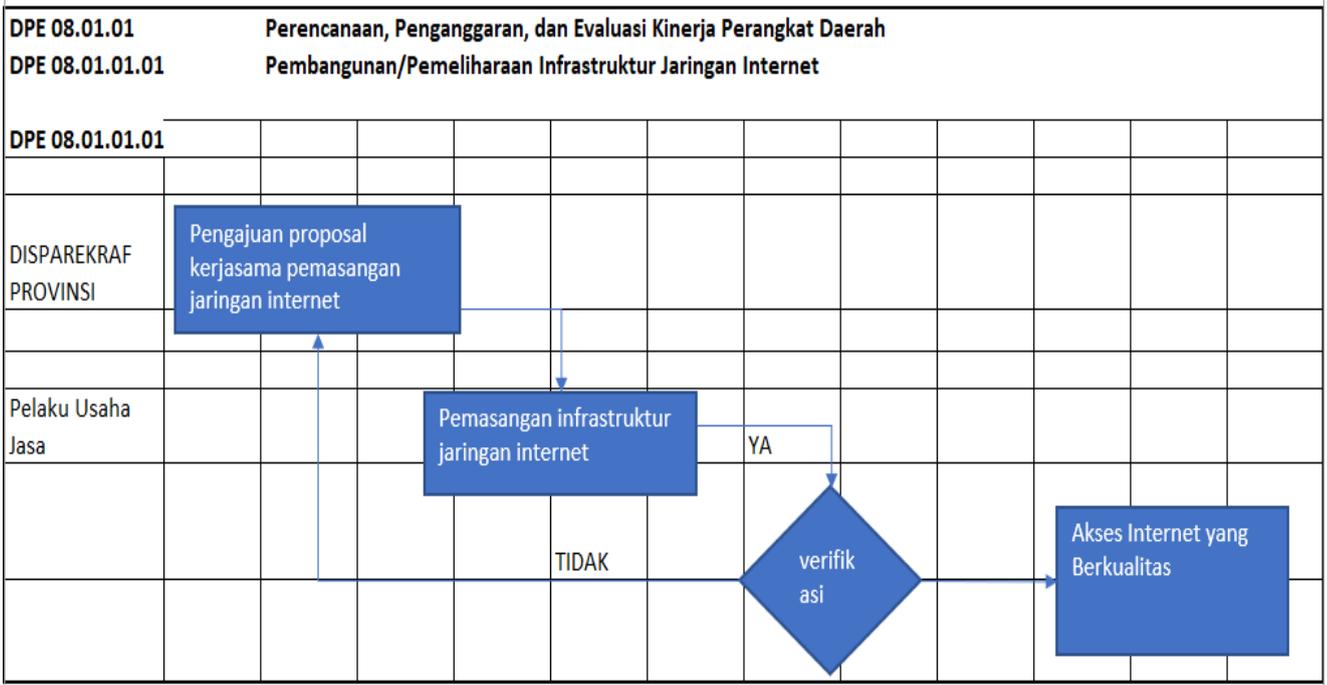


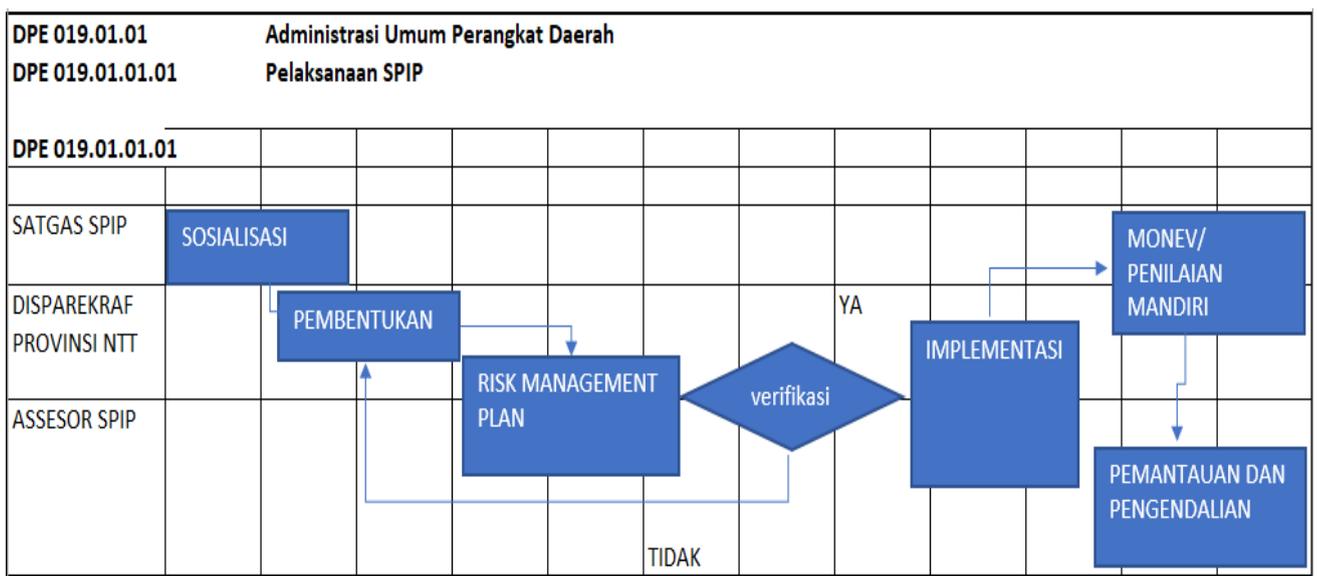
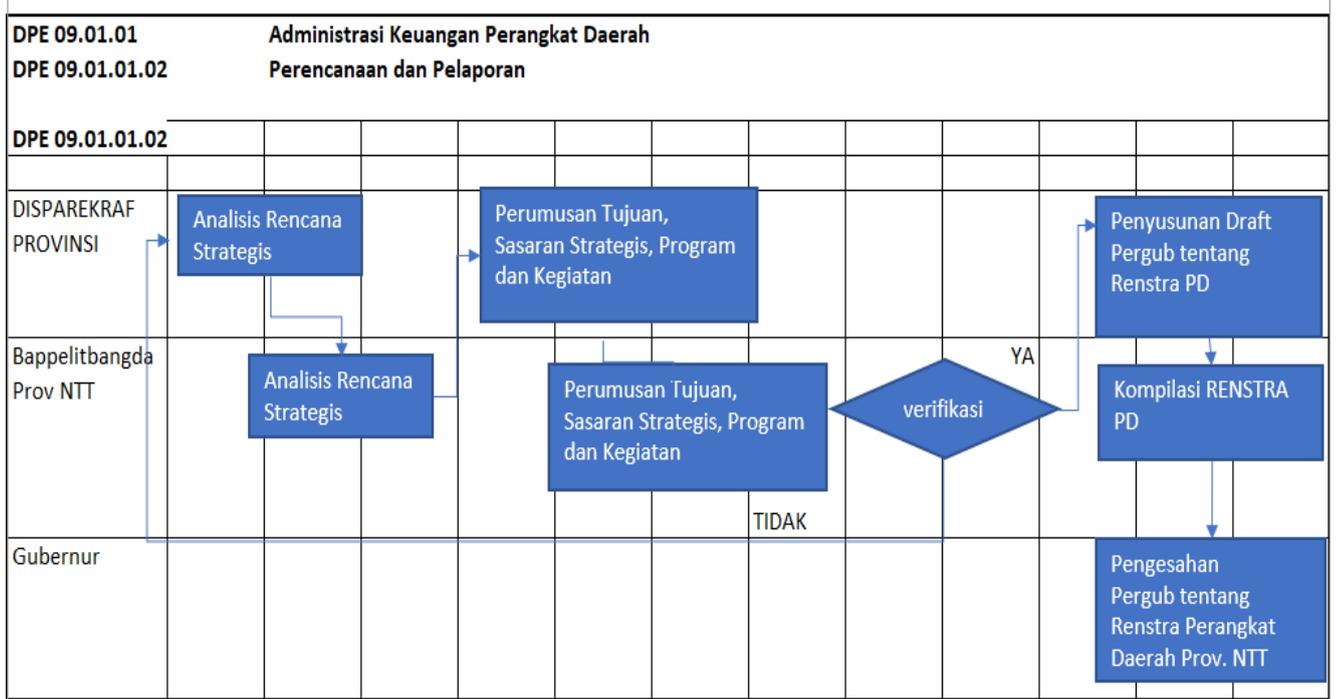


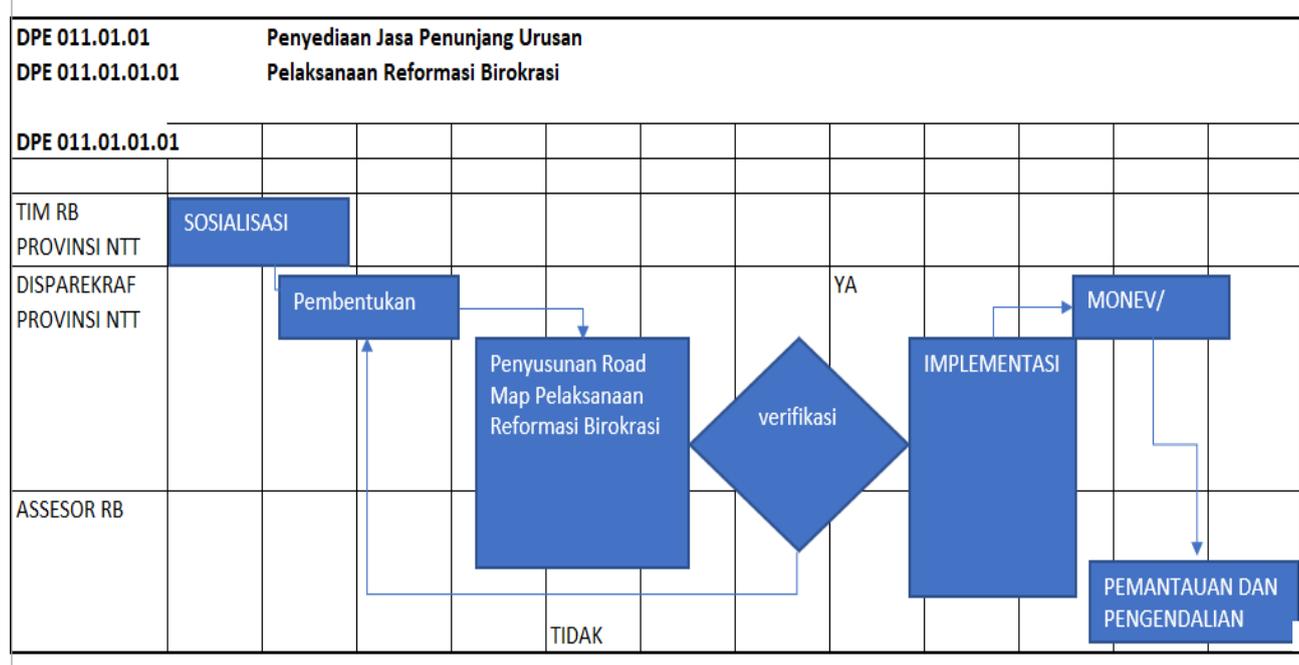
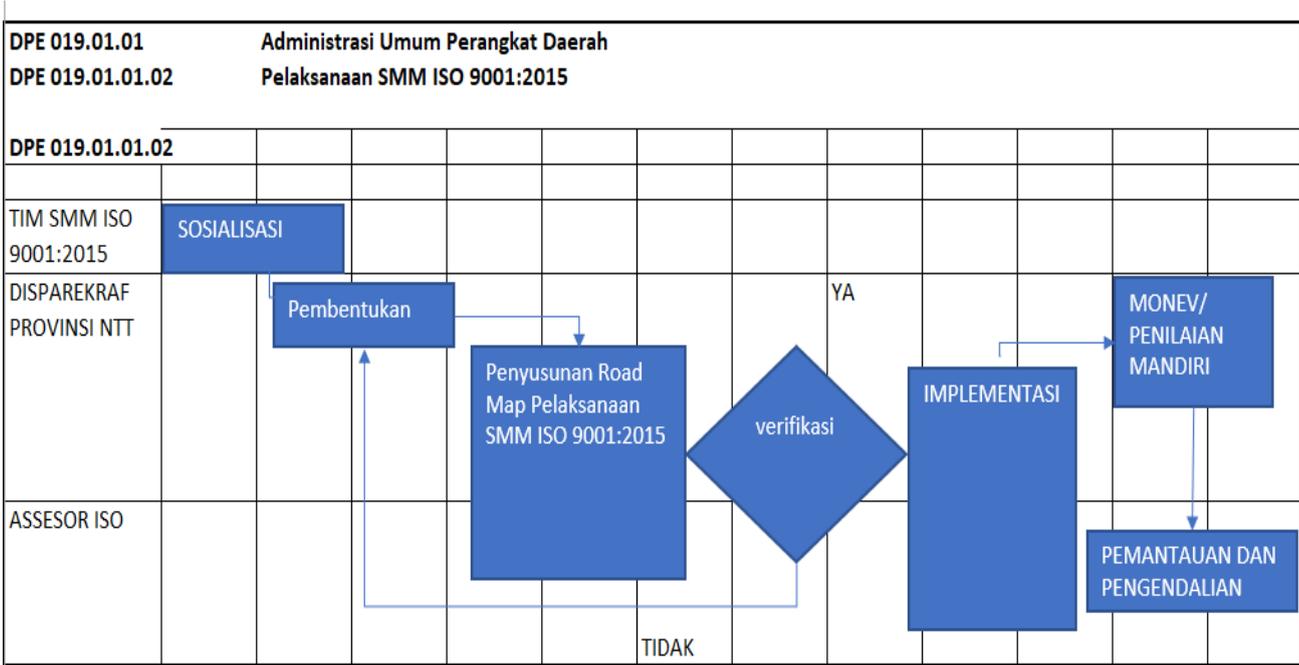


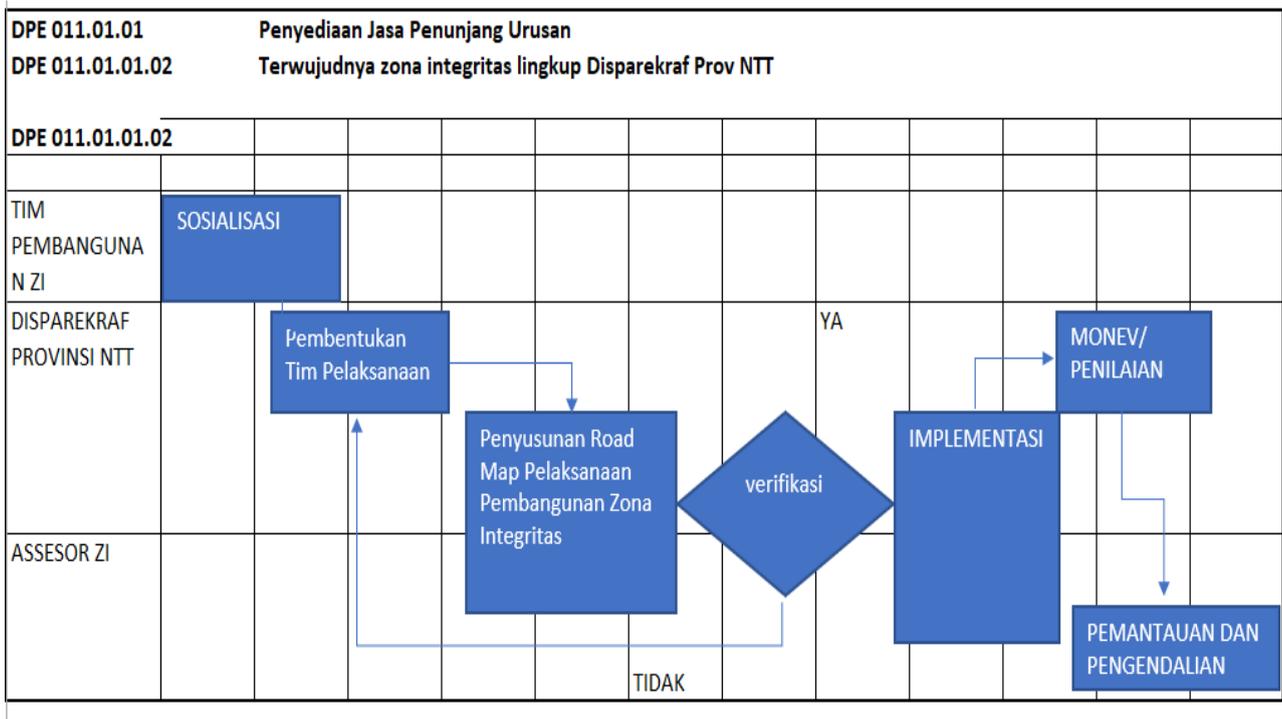


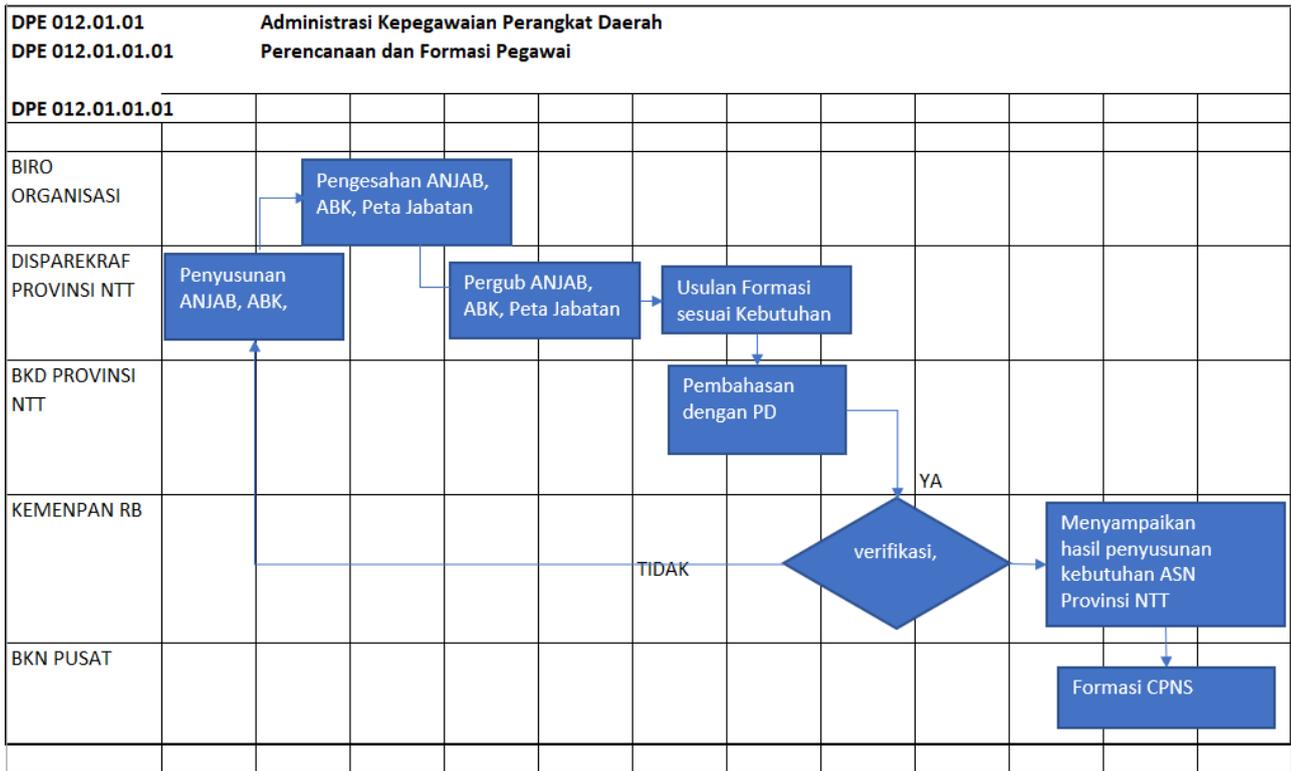












GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR**

Asal Surat : Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 Tanggal Pengajuan : 8-11-2022
 Perihal : Peln Proses Bisnis Dmar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Prov NTT Tahun 2018-2023

KEPALA BIRO HUKUM	Diteruskan kepada Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: Asisten @ II/ III : 8-11-2022 : 	
<input checked="" type="checkbox"/> Asisten I <input type="checkbox"/> Asisten II <input type="checkbox"/> Asisten III	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: 08-11-2022 : 14-55 :  : 9/11-22 / 1420	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
SEKRETARIS DAERAH	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada <input type="checkbox"/> Gubernur <input type="checkbox"/> Wakil Gubernur Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: : : :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
WAKIL GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada <input checked="" type="checkbox"/> Gubernur Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: : : 10/11/22/13 ⁰⁰ : 	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :